

Laporan Kinerja Triwulan II

2024

Direktorat
Pengolahan
dan Bina Mutu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020- 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP ada dua yaitu, Volume Produk Olahan (VPO) dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan II Tahun 2024 sebesar 110,94% (kategori istimewa). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak



terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Juli 2024
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Widya Rusyanto



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (performance results) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan II Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 11 (sebelas) **Sasaran Kegiatan (SK)** sebagai berikut: (1) Utilitas UPI yang meningkat; (2) Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan; (3) Terlaksananya sertifikasi produk KP; (4) Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP; (5) Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk KP; (6) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (7) Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan; (8) Tersedianya prasarana system rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan (9) Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan; (10) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan; (11) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 11 IKK bersifat tahunan, 10 IKK bersifat triwulan, 1 IKK bersifat semesteran, dan 2 IKK bersifat bulanan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan (produk), Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan *Utilitas*) (data), Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dibangun (unit), Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (orang),



Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Nilai penilaian mandiri sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%), Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Utilitas UPI yang Meningkatkan (%), Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk), Pabrik Es yang Dibangun (Unit), *Chest freezer* yang Disediakan (Unit), Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit), Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit), Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit), UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina (industri), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Indikator yang bersifat bulanan yaitu Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM), Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sepuluh (10) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan II adalah sebesar 110,94 (kategori istimewa). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetnya pada Triwulan II. Adapun rincian capaian periode Triwulan II yaitu sebagai berikut :

- IKK Perhitungan Utilitas UPI (%); target 68%; capaian 68,12% atau 100%.



- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP); target 840 Produk; capaian 945 Produk atau 112,5% dari target.
- IKK *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit); target 91 unit; capaian 159 unit atau 120% dari target.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 820 UMKM; capaian 820 UMKM atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 375 UMKM; capaian 375 atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri); target 180 industri; capaian 220 industri atau 118,18%.
- IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (IKU); target 9.540 orang; capaian 10.239 orang atau sebesar 107,33%.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks); target 78; capaian 86,44 atau sebesar 110,82%.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%); target 80; capaian 100 atau sebesar 120%.
- IKK Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar; target 94; capaian 133,33% atau 120%.

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.9.178.309.000,- dari pagu semula Rp69.198.100.000,- menjadi Rp 60.019.791.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp9.313.948.628 atau setara dengan 15,52% dari pagu setelah AA. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang



Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan II Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.



DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia	3
1.5. Permasalahan Utama	4
1.6. Sistematika Penyajian	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan	7
BAB III	11
AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Nilai Kinerja Organisasi pada periode pelaporan tahun berjalan	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
IK 1. Persentase Utilitas UPI yang Meningkatkan (%)	14
IK 2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)	22
IK 3. Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)	32
IK 4. Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)	40
Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)	40
IK 5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)	49
IK 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)	54



Tabel 8. Tabel Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)	55
IK 7. Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	56
IK 8. Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit).....	61
IK 9. Chest Freezer Yang Disediakan (Unit).....	67
IK 10. Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	71
IK 11. Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit).....	76
IK 12. Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit) ...	83
IK 13. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)..	90
IK 14. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)	99
IK 15. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri).....	111
IK 16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai).....	121
IK 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	123
IK 18. Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai).....	125
IK 19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	126
IK 20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	127
IK 21. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	128
IK 22. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%).....	129
IK 23. Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	130
IK 24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	133
Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	134
BAB IV	135
PENUTUP	135
4.1. Kesimpulan.....	135
4.2. Permasalahan	136



4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	137
4.4. Lampiran.....	139



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024.....	8
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024	12
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	15
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)	23
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk	33
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data).....	40
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit).....	49
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang).....	55
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	57
Tabel 10. Target dan Realisasi Pabrik Es Portable yang dibangun (unit).....	62
Tabel 11. Target dan Realisasi Chest Freezer yang disediakan (unit).....	68
Tabel 12. Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit).....	72
<i>Tabel 13. Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit)....</i>	<i>77</i>
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan (unit)	84
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)	91
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM).....	100
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)	112
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	122
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks).....	124
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	125
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	126
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	128
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi).....	129
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	130
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	131



Tabel 26. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024.....	131
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%).....	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	3
Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia.....	4
Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	6
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW II Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada aplikasi kinerjaku	11
Gambar 5. Rapat Penyusunan dan Pembahasan Draft Pedoman Pengumpulan Dan Penghitungan Data Utilitas dan Volume Produk Olahan (VPO) Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024	17
Gambar 6. Rapat Audiensi PT. Citra Dimensi Arthali (CEDEA)	20
Gambar 7. Rapat Persiapan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP	21
Gambar 8. Workshop Pendataan UPI Menengah Besar	22
Gambar 9. Rapat Penyusunan RSNI1 Produk Perikanan Non Pangan.....	25
Gambar 10. Rapat Pembahasan Kategori Pangan HPI (Hidrolisat Protein Ikan) dan Kukis Ikan.....	27
Gambar 11. Rapat Pembahasan RSNI Ikan Asap dengan Pengasapan Dingin	29
Gambar 12. Rapat Pembahasan RSNI Pengemasan Ikan Segar atau Hidup untuk Transportasi Udara	30
Gambar 13. Rapat Teknis RSNI2 Produk Perikanan	31
Gambar 14. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	35
Gambar 15. Rapat Pembentukan Sistem Pembinaan Berbasis ISO 9001	37
Gambar 16. Koordinasi Pembina Mutu Terdaftar	38
Gambar 17. Kunjungan lapangan untuk perhitungan losses bersama dengan Tim penghitungan losses hasil perikanan di Jawa Timur bersama JP2GI	47
Gambar 18. Keikutsertaan workshop satu bidang PDSPKP	48
Gambar 19. Sosialisasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI).....	51
Gambar 20. Kunjungan Lapang Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak	52
Gambar 21. Rapat Sosialisasi Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak	54
Gambar 22. Rapat Review Aplikasi NTPHP	59
Gambar 23. Workshop Penghitungan NTPHP 2024	61
Gambar 24. Kunjungan Lapang ke Kab. Situbondo	64
Gambar 25. Rapat koordinasi Pabrik Es Portable di Kab. Situbondo.....	67
Gambar 26. Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) <i>Chest Freezer</i>	71
Gambar 27. Rapat Koordinasi Penyaluran BP PP Tahun 2024 dengan Mitra	74
Gambar 28. Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Peralatan Pengolahan (PP) Tahun 2024, Verifikasi Proposal PP Tahun 2024, Dan Evaluasi Pemanfaatan PP Tahun 2023.....	76
Gambar 29. Rapat Pembahasan Spesifikasi Peralatan Sarana Pasca Panen	79
Gambar 30. Koordinasi dan Identifikasi Lapang di Provinsi Aceh.....	83
Gambar 31. Rapat Pembahasan Spesifikasi Peralatan Sarana Pasca Panen	86
Gambar 32. Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2024.....	88
Gambar 33. Rapat koordinasi dengan Dinas KP dan kelompok calon penerima Bantuan Pemerintah (BP) Sarana Peralatan Pengolahan (SPP) MP Koorporasi	90



Gambar 34. Pembinaan dalam rangka Modelling Sentra Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klungkung - Bali	94
Gambar 35. Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM.....	96
Gambar 36. Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik Tahun 2024.....	98
Gambar 37. Rapat Koordinasi Data Beririsan Biofarmakologi dan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Pangan (UPHPN)	105
Gambar 38. Partisipasi UMKM Produk Perikanan Bernilai Tambah pada <i>event Internasional Indonesia Seafood & Meat Expo 2024 (IISM)</i>	106
Gambar 39. Pelatihan Checker Mutu Ikan	107
Gambar 40. Hari Keluarga Nasional	108
Gambar 41. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk.....	109
Gambar 42. Bimbingan Teknis Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah	111
Gambar 43. Kunjungan Lapang ke PT. Jembatan Lintas Global	114
Gambar 44. Kunjungan Lapang ke PT. Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia	115
Gambar 45. Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	130
Gambar 46. Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Volume Produk Olahan (VPO) hasil perikanan bernilai tambah, namun pada Triwulan II tahun 2024 capaian tersebut belum terlihat karena bersifat tahunan. Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian



kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu 2024”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan public;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pembinaan mutu meliputi standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;



- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.



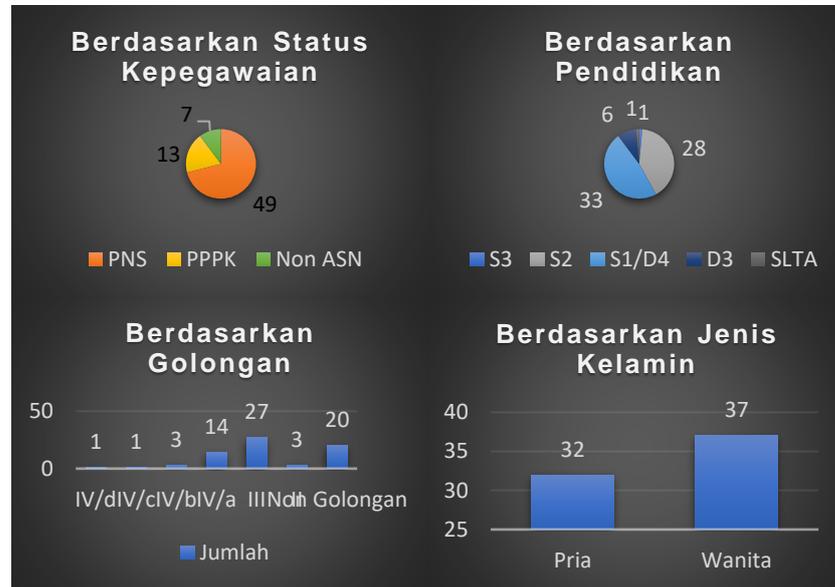
Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2024 berjumlah 69 orang dengan komposisi 49 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 7 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 32 orang dan Wanita sebanyak 37 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah PNS S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 28 orang, S1/D4 sebanyak 33 orang, D3 sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak



3 orang, Gol ruang IV/a sebanyak 14 orang, Gol III sebanyak 27 orang dan Gol II sebanyak 3 orang, Non golongan ada 20 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengolahan dan pembinaan mutu produk perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan permasalahan sektor riil yang dihadapi stakeholders/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti : penanganan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana. Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikrokecil, usaha menengah besar kelautan dan perikanan, serta tantangan lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian dan diselesaikan. Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro-kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan sering



berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perijinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, traceability) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan. Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, Traceability), dan belum memiliki sertifikat lingkungan.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Tahun 2024. Pencapaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2024 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan



kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan II Tahun 2024 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis



untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2024
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	10.000
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	1
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	38.159
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	11
9	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
		12 Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
10	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13 Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800
		14 Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		15 UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		17 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87
		18 Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84
		19 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		20 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80
		21 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94
		23 Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
24 Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup	80		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
		Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	

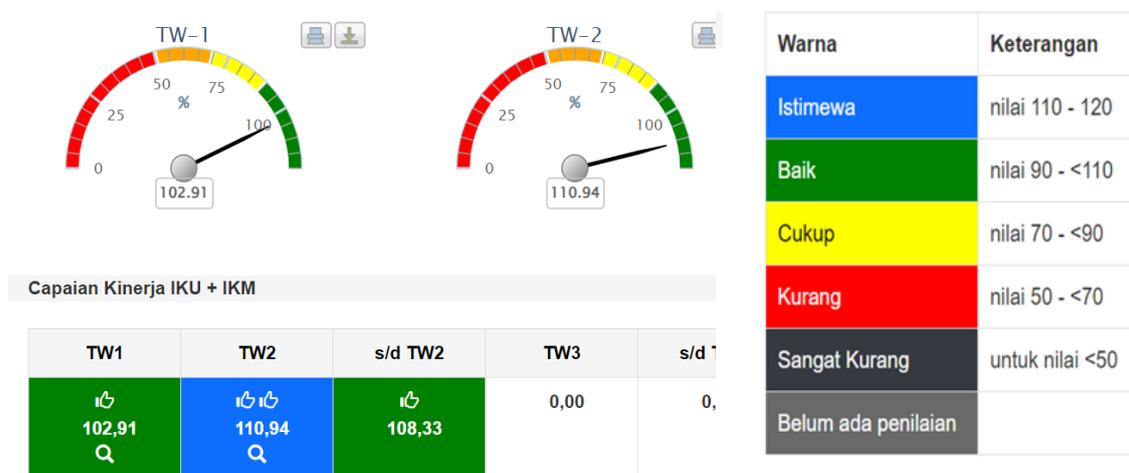


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi pada periode pelaporan tahun berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 24 indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, 10 indikator kinerja bersifat triwulanan, dan 2 indikator kinerja bersifat bulanan. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari April sampai dengan Juni 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan II sebesar 110,94. Adanya peningkatan 8,03 poin atau 7,80% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 1,19 poin atau 1,08%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW II Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu s.d. Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi	% Terhadap Target		
			TAHUN 2024	TW II		TAHUN 2024	TW II	
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68	68	68,12	100,18	100,18
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15	-	-	-	-
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	10.000	840	962	9,62	114,52
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3	-	-	-	-
5	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	1	-	-	-	-
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	38.159	9.540	10.239	26,83	104,8
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25	-	-	-	-
8	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	11	-	-	-	-



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW II		TAHUN 2024	TW II
9	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311	91	159	51,13	120
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270	-	-	-	-
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9	-	-	-	-
		12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8	-	-	-	-
10	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800	820	820	45,56	100,00
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875	375	375	42,86	100,00
		15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500	180	220	44	122,22
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75	-	-	-	-
		17	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87	78	86,44	99,36	110,82
		18	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84	-	-	-	-
		19	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100	-	-	-	-



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW II		TAHUN 2024	TW II
20		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80	80	100	125	120	
21		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1	-	-	-	-	
22		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94	94	133,33	141,84	141,84	
23		Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95	-	-	-	-	
24		Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80	-	-	-	-	

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kegiatan 1.Utilitas UPI yang Meningkatkan

IK 1. Persentase Utilitas UPI yang Meningkatkan (%)

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun



perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
	Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	68	-	-	68	68,12	-	-	68,12	100,18	100,18	-

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Utilitas UPI yang meningkat adalah 68,12%. Capaian indikator Persentase Utilitas UPI yang meningkat sampai dengan triwulan II adalah sebesar 68,12 atau meningkat sebesar 68,12% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0%, hal tersebut dikarenakan IK Persentase Utilitas UPI yang meningkat dilaporkan secara triwulanan yang dimulai pada triwulan II. Capaian ini setara dengan 100,18% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 68%. Pada triwulan II tahun 2023 indikator kinerja tersebut belum memiliki capaian, karena indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 di laporkan dengan periode tahunan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 68%, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 100,18%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghitungan utilitas sebesar Rp. 170.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 52.491.900,- atau sebesar 30,88 % dari pagu anggaran.



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II ini adalah belum adanya data sarana prasarana yang diperoleh dari enumerator sebagai dasar perhitungan utilitas. Adapun keberhasilan atau pencapaian adalah telah tersosialisasinya pendataan UPI menengah besar. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah menetapkan tim analisis data dan melakukan monitoring terhadap data sarana prasarana yang di input enumerator.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung penghitungan utilitas antara lain :

1. Rapat Penyusunan dan Pembahasan Draft Pedoman Pengumpulan Dan Penghitungan Data Utilitas dan Volume Produk Olahan (VPO) Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024.

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan Selasa 2 April 2024 di Ruang rapat Wisma Gracilaria, Pulo Mas, Jakarta.

- Peserta:

Rapat dihadiri oleh, Tim Kerja Data Statistik Pusdatin, Tim Kerja Data dan layanan Publik Setditjen PDSPKP, Penanggung Jawab Data Ditjen PDSPKP, perwakilan Tim Kerja PUP2MK Direktorat PBM, serta Pelaksana Tim Kerja PUP2MB.

- Tujuan Kegiatan:

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan penyempurnaan atas draft pedoman penghitungan data utilitas dan VPO UPI MB tahun 2024 yang telah disiapkan.

- Pembahasan

Rapat dipimpin Ketua Tim Kerja PUP2MB menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan pedoman penghitungan data utilitas dan VPO UPI MB tahun 2024, yaitu:

- a. Pengumpulan data bersumber dari data lalu lintas BP2MHKP yang diperoleh dari aplikasi Sister Karoline Selanjutnya data yang dikumpulkan dari BP2MHKP berupa data konsumsi dan untuk non konsumsi diperoleh dari badan karantina Indonesia;



- b. Tambahkan kriteria terkait rutinitas ekspor minimal 10 ton perbulan sebagai salah satu kriteria tidak digunakan lagi karena tidak ada justifikasi, hanya menggunakan kriteria modal, hasil penjualan tahunan dan jumlah tenaga kerja sebagaimana amanat regulasi
 - c. Penambahan Bab Pelaporan yang tugas tim Analisa data untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Pengolahan dan Bina Mutu secara berkala terkait progress kegiatan penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB.
- Kesimpulan:
Disampaikan hasil pembahasan pedoman akan dirapikan dan ditelaah lebih lanjut secara internal Direktorat PBM dan untuk lebih menyempurnakan serta memperkaya materi muatan pedoman, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan draft pedoman pendataan yang telah disiapkan. Pembahasan akan dilakukan bersama tim data Ditjen PDSPKP serta tim Pusdatin dengan harapan pedoman ini implementatif.



Gambar 5. Rapat Penyusunan dan Pembahasan Draft Pedoman Pengumpulan Dan Penghitungan Data Utilitas dan Volume Produk Olahan (VPO) Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024



2. Mengikuti Rapat Koordinasi dan Pembahasan Bisnis Proses Pendataan Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI)

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 di Ruang Rapat Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16, Jakarta Pusat.
- Peserta:
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKPK), Direktorat Pengolahan, DJPDSPKP.
- Tujuan Kegiatan:
Rapat bertujuan untuk koordinasi dan pembahasan bisnis proses pendataan produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI).
- Hasil:
Pada rapat tersebut dilakukan beberapa pembahasan, antara lain Pembahasan terkait Alur Pendataan Produksi UPI Mikro Kecil (MK) dan Pembahasan terkait Alur Pendataan Produksi UPI Menengah Besar (MB).
- Kesimpulan:
Sekretariat DJPDSPKP melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berkaitan dengan reviu dan finalisasi bisnis proses UPI MB dan kuesioner pendataan produksi lingkup DJPDSPKP, serta menyampaikan bisnis proses UPI MB dan kuesioner pendataan PDSPKP final ke Pusdatin paling lambat tanggal 3 Mei 2024.

3. Rapat Audiensi PT. Citra Dimensi Arthali (CEDEA)

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2024, bertempat di Ruang Rapat SKP, Gedung Mina Bahari III Lt. 13, Jakarta Pusat.
- Peserta:
Rapat dihadiri oleh Direktur Pemasaran, Ibu Artati Widiarti Pembina Mutu Ahli Utama, perwakilan masing-masing Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, dan perwakilan PT. CEDEA.
- Tujuan Kegiatan:



Tujuan rapat tersebut dalam rangka peningkatan volume produk olahan dan utilitas unit pengolahan ikan.

- Hasil:

Dalam audiensi tersebut disampaikan beberapa hal, yaitu:

- a. Kapasitas produksi olahan jadi (produk untuk digoreng, direbus, dikukus dan dibakar) tahun 2024 ditargetkan sebesar 118.200 ton yang dihasilkan dari UPI di Majalengka dan Semarang.
- b. Adapun pemasaran produk PT. CEDEA 95% pasar lokal dan 5% pasar ekspor (Papua Nugini, Korea, Jepang, Hongkong).
- c. Kebutuhan surimi PT. CEDEA dipasok dari supplier lokal yakni PT. Java Seafood-Indramayu, CV. Ocean Marine Indonesia-Tegal, dan PT. Holi Mina Jaya-Rembang, dan impor dari Thailand, Malaysia dan Vietnam.

- Kesimpulan:

PT. CEDEA membutuhkan dukungan pemerintah dalam pengembangan usahanya, antara lain:

- a. Kemudahan dalam pengurusan perizinan salah satunya izin edar untuk produk olahan ikan
- b. Dukungan penguatan akses pemasaran dalam dan luar negeri.
- c. Dukungan kebijakan untuk memperkuat perkembangan industri surimi Indonesia dan kebijakan kemudahan importasi surimi karena keterbatasan produksi dalam negeri
- d. Dapat mengetahui informasi trend *update* impor produk olahan berbasis surimi ke Indonesia untuk mengetahui persaingan produk impor yang sejenis.



Gambar 6. Rapat Audiensi PT. Citra Dimensi Arthali (CEDEA)

4. Mengikuti Rapat Persiapan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Rapat dilaksanakan pada Selasa 28 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari III Lt. 13, Jakarta Pusat
- Peserta:
Rapat dihadiri oleh perwakilan masing-masing eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP.
- Tujuan Kegiatan:
Rapat dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024.
- Hasil:
Rapat dipimpin oleh Katimja data dan layanan publik. apat membahas tentang Rencana Workshop Satu Data Bidang PDSPKP 2024, Pembahasan UPI MB, UPI MK, dan UPHPN, Pembahasan Coldstorage pada Satudata, dan Pendataan Harga Ikan.
- Kesimpulan:
Akan dilaksanakan Workshop Satu Data pada tanggal 11-12 Juni 2024 di Kota Semarang. Dalam kegiatan sosialisasi pendataan perlu disiapkan materi yang akan disampaikan dan juga narasumber yang akan menyampaikan materi



tersebut. Narasumber agar disiapkan oleh masing-masing unit eselon 2 sesuai kegiatan pendataan yang dilakukan



Gambar 7. Rapat Persiapan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP

5. Workshop Pendataan UPI Menengah Besar

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada 11-12 Juni 2024, bertempat di Hotel Ciputra, Semarang.
- Peserta:
Rapat dihadiri oleh perwakilan masing-masing eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP.
- Tujuan Kegiatan:
Workshop pendataan UPI MB diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mendata volume produk olahan dan utilitas. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam pengembangan industry.
- Hasil:
WorkShop 1 Data adalah pelatihan bagi validator dan enumerator dan sosialisasi pendataan tsb. Pada tahun ini TP pendataan PDSPKP, dengan anggaran tersedia dapat menghasilkan data yang bermanfaat, dan membuka peluang silaturahmi dan kolaborasi, akhirnya memberi kontribusi positif bagi tahun ini. Tanpa data akurat, kebijakan yang diambil dapat tidak sesuai sasaran, juga sebagai target kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan data PDS diperlukan tata Kelola perbaikan data di PDSPKP



sebagaimana diamanatkan pada peraturan tentang 1 data KP. Peran tidak hanya sebagai peran enumerator juga sebagai garda terdepan, dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam membangun data PDSPKP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor ini.

- Kesimpulan:

Beberapa kesimpulan yang didapat dalam rapat, yaitu:

- a. Agar penyelenggaraan asistensi dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan kontinuitas pemahaman dan kemampuan peserta.
- b. Pembuatan modul buku panduan pendataan.
- c. Menyediakan dukungan teknis pasca workshop untuk membantu peserta dalam mengatasi kendala yang mungkin dihadapi saat kembali ke tempat kerja masing-masing.



Gambar 8. Workshop Pendataan UPI Menengah Besar

Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan

IK 2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Rekomendasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun



oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam International Classification for Standards (ICS). Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat. Instansi teknis tersebut salah satunya adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang membentuk dan mengelola Keanggotaan dan Kesekretariatan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Komtek 65-08 Produk Perikanan Nonpangan. Kedua Komtek tersebut memiliki tugas dalam perumusan dan penyusunan SNI produk perikanan dan produk perikanan nonpangan. Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan : 1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat; 3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (e-balloting) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di website SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Tabel 4. Ikhtisar Pecapaian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan II.



Adanya persamaan jumlah target dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 15 produk hasil kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja rancangan RSNI produk hasil kelautan yang diimplementasikan dengan pagu Rp 1.198.191.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 401.740.750,- atau sebesar 33,53% dari pagu anggaran

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) :

1. Rapat Penyusunan RSNI1 Produk Perikanan Non Pangan

- Waktu dan Tempat:

Rapat dilaksanakan tanggal 14-16 Mei 2024 dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi.

- Peserta:

Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-08, konseptor, sekretariat komtek 65-08 sekaligus editor RSNI Produk Perikanan Nonpangan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Ketua Komtek 65-08.

- Tujuan

Rapat RSNI1 65-08 ini membahas konsep yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNI0 berdasarkan data dukung dan literatur.

- Pembahasan

Dilakukan pembahasan 7 RSNI yaitu :

- a. Tanaman hias air mikrosorum (*Micosorum pteropus*) - Syarat mutu dan penanganan
- b. Ikan hias cardinal - Syarat mutu dan penanganan
- c. Ikan hias mas koki (*Carassius auratus*) – Syarat mutu dan penanganan
- d. Ikan hias guppy (*Poecilia* spp.) - Syarat mutu dan penanganan
- e. Bubuk ekstrak albumin ikan gabus (*Channa striata*) sebagai sumber albumin - syarat mutu dan pengolahan
- f. Ikan hias rainbow (*Melanotaenia* spp.) - Syarat mutu dan penanganan
- g. *Spirulina* spp. kering – Syarat mutu dan pengolahan



- **Kesimpulan**
Berdasarkan hasil pembahasan RSN1 yang telah dilaksanakan, Komite Teknis menyepakati 7 dokumen RSN1 yang telah dibahas. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat teknis RSN2 65-08.



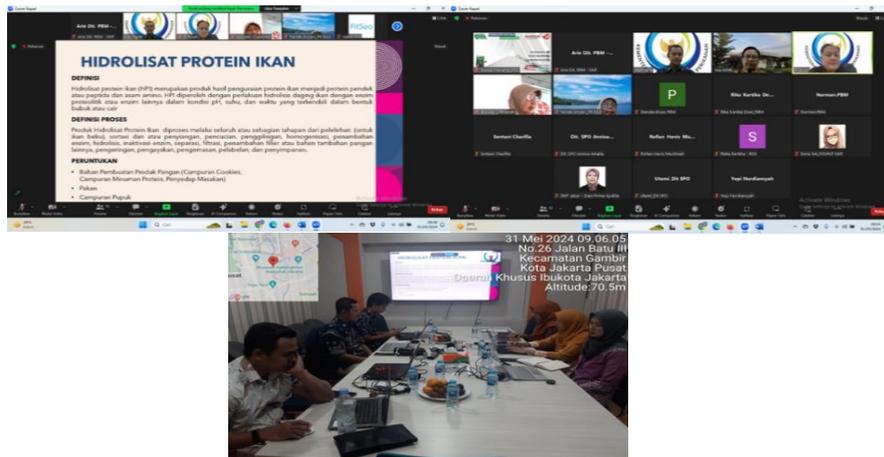
Gambar 9. Rapat Penyusunan RSN1 Produk Perikanan Non Pangan

2. Rapat Pembahasan Kategori Pangan HPI (Hidrolisat Protein Ikan) dan Kukis Ikan

- **Waktu dan Tempat:**
Rapat dilaksanakan tanggal 31 Mei 2024 di RR SKP It 13 GMB III
- **Peserta:**
Rapat dibuka oleh Penanggungjawab Kegiatan Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar dan dihadiri perwakilan dari BPOM (Ibu Deksa, Ibu Utami, Ibu Annisa dan Ibu Sentani), Ketua Tim Kerja Lingkup Direktorat PBM dan Pelaksana pada Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar, Perwakilan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Konseptor 65-05 Produk Perikanan.
- **Tujuan:**
Tujuan rapat untuk menentukan kategori pangan HPI dan kukis Ikan.
- **Pembahasan:**
Beberapa hasil yang didapat dalam rapat, sebagai berikut:



- a. Belum ada kategori pangan untuk hidrolisat protein ikan dalam Peraturan BPOM nomor 13 Tahun 2023.
 - b. BPOM sedang dalam pembahasan untuk perubahan Peraturan BPOM tentang kategori pangan dan hidrolisat protein ikan akan diusulkan untuk dimasukkan dalam katagori pangan 12.10 Protein Produk.
 - c. Hal lain terkait dengan RSN11 Hidrolisat protein ikan, BPOM memberikan masukan: (1) lingkup HPI dengan proses enzimatik hanya untuk produk pangan, sehingga peruntukan tidak perlu dicantumkan kata pakan dan campuran pupuk; (2) bahan tambahan pangan lainnya diubah menjadi bahan tambahan pangan karena hanya menggunakan satu jenis bahan tambahan pangan.
 - d. Kukis ikan masuk dalam katagori pangan 07.2.1 Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau *Custard, Vla*). Dengan dimasukkannya kukis ikan dalam kategori pangan 07.2.1, maka perlu ada batasan maksimal ikan yang menjadi bahan baku (50%)
 - e. Hal lain terkait dengan RSN11 Kukis ikan BPOM memberikan masukan:(1) Definisi produk perlu ditambahkan bahan baku daging ikan (segar atau beku) atau moluska atau krustasea atau ekinodermata atau hidrolisat protein ikan serta perlu dicantumkan komposisi minimal persentase ikan yang digunakan; (2) Judul SNI perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan bila bahan baku tepung yang digunakan menggunakan selain tepung terigu, seperti mocaf, HPI, atau sagu.
- Kesimpulan
Masukan-masukan dari BPOM akan menjadi bahan dalam pembahasan komtek pada rapat teknis (RSNI2) Produk Perikanan.



Gambar 10. Rapat Pembahasan Kategori Pangan HPI (Hidrolisat Protein Ikan) dan Kukis Ikan

3. Rapat Pembahasan RSNi Ikan Asap dengan Pengasapan Dingin

- Waktu dan Tempat:

Rapat dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024 melalui aplikasi Zoom Meeting.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh Perwakilan Manager PT. Prasetya Agung Cahaya Utama (PT. PACU) – Bali, Konseptor Agung Amirul Fanani (Dit. Pemberdayaan Usaha), Yusuf Arif Wahyudi (Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar) dan Perwakilan Sekretariat Komtek 65-05.

- Tujuan

Rapat bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada pelaku usaha dan mempertimbangkan informasi yang didapat dari Pelaku Usaha untuk dirumuskan dalam definisi pengasapan dingin.

- Pembahasan

Beberapa materi yang dibahas dalam rapat, sebagai berikut:

- a. Definisi ikan asap dan definisi pengasapan dingin.
- b. Metode pengasapan dingin jarang ditemui dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. PT. PACU merupakan salah satu pelaku usaha yang melakukan metode tersebut. Metode yang digunakan adalah pengasapan dingin yang menyalurkan asap pembakaran kayu aromatik dalam *chamber* dengan suhu dingin yaitu 3-5 °C. Dalam



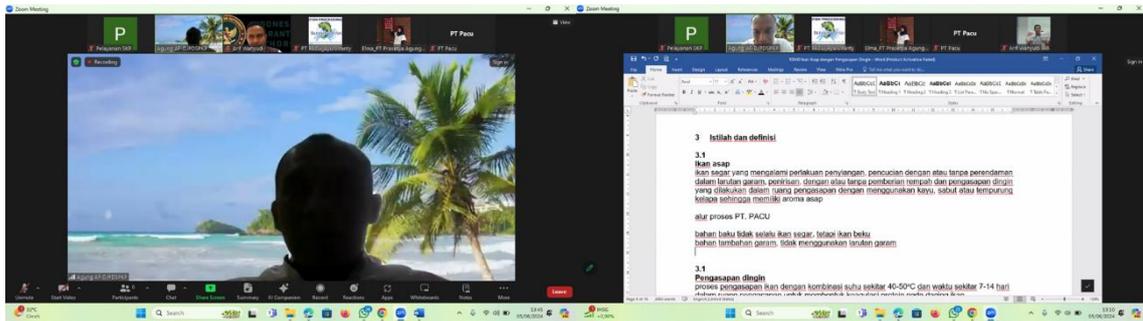
pembahasan, disampaikan bahwa dengan perlakuan suhu yang dingin tersebut dapat menyebabkan kondensasi asap sehingga diduga pengasapan kurang maksimal. Namun, metode tersebut berhasil untuk menghasilkan produk ikan asap setelah dikonfirmasi ke PT. PACU.

- c. Dalam hal ini, metode pengasapan yang dilakukan PT. PACU dijadikan acuan pembandingan mengingat metode yang banyak digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia adalah menggunakan suhu 30-50 °C.
- d. Memperhatikan definisi yang terdapat pada CXS 311-2013 amended 2018 bahwa pengasapan dingin menggunakan kombinasi suhu dan waktu yang mengakibatkan koagulasi protein yang tidak signifikan. Dalam hal ini Codex tidak menentukan besar suhu dan lama pengasapan.
- e. Berkaitan dengan persyaratan mutu dan keamanan dibahas juga cemaran kimia Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) yang disyaratkan oleh BPOM. Dalam Peraturan BPOM nomor 8 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan disyaratkan kandungan PAH dalam ikan asap adalah 5,0 ppb dalam bentuk *Benzo[a]pyrene* dan 12,0 ppb dalam bentuk *Total benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, dan chrysene*.

Disepakati bahwa jarak pengasapan tidak dapat menjadi acuan mengingat yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat bervariasi.

- Kesimpulan

Hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh Konseptor untuk dilakukan perumusan definisi pengasapan dingin dan menentukan batasan cemaran kimia PAH.



Gambar 11. Rapat Pembahasan RSNI Ikan Asap dengan Pengasapan Dingin

4. Rapat Pembahasan RSNI Pengemasan Ikan Segar atau Hidup untuk Transportasi Udara

- Waktu dan Tempat:
Rapat dilaksanakan tanggal 13 Juni 2024 di RR SKP It 13 GMB III
- Peserta
Rapat Pembahasan RSNI Pengemasan Ikan Segar atau Hidup untuk Transportasi Udara dibuka oleh Sekretaris Komite Teknis 65-05 dan dihadiri oleh Sukar Prayitno dan Cecep Iman Sobari selaku Koseptor RSNI Produk Perikanan dan Editor RSNI Produk Perikanan.
- Tujuan
Tujuan rapat adalah untuk membahas substantif dan editorial RSNI Pengemasan Ikan Segar Atau Hidup Untuk Transportasi Udara
- Pembahasan
Adapun perbaikan redaksi untuk RSNI Pengemasan Ikan Segar Atau Hidup Untuk Transportasi Udara perlu dilakukan di bagian Pendahuluan, substansi dasar hukum perlu ditinjau kembali agar relevan dengan RSNI yang disusun, dan penyesuaian kode *International Certification Standard (ICS)*.
- Kesimpulan
Konseptor akan memperbaiki sesuai masukan dari peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat teknis RSNI2 65-05.



Gambar 12. Rapat Pembahasan RSNI Pengemasan Ikan Segar atau Hidup untuk Transportasi Udara

5. Rapat Teknis RSNI2 Produk Perikanan

- Waktu dan Tempat:

Rapat dilaksanakan tanggal 26-28 Juni 2024 secara hybrid melalui pertemuan secara langsung dan telekonferensi menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

- Peserta:

Rapat dihadiri oleh 44 orang terdiri dari 12 anggota Komtek 65-05, 23 orang Konseptor, 9 orang sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSNI produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Sekretaris Komtek 65-05.

- Tujuan:

Rapat Teknis RSNI2 membahas teknis yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNI2 berdasarkan data dukung dan literatur.

- Pembahasan:

Rapat teknis membahas 10 RSNI Produk Perikanan yaitu :

- a. Ikan renyah
- b. Bandeng duri lunak
- c. Ikan asap dengan pengasapan dingin



- d. Kerupuk ikan, udang dan moluska
- e. Bandeng isi
- f. Kukis ikan
- g. Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara
- h. Cara uji fisika - Bagian 8 Penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial
- i. Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride - spektroskopi serapan atom (HG-AAS)
- j. Hidrolisat Protein Ikan

Beberapa masukan hasil pembahasan antara lain: pada prakata metode yang digunakan pertemuan fisik dan virtual, penulisan hak paten menjadi hak kekayaan intelektual (HAKI), pemutakhiran beberapa peraturan yang sudah tidak relevan, perbaikan redaksional dan penulisan tanda baca, penulisan definisi proses akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal apakah akan mengikuti format dalam Codex (menjelaskan definisi setiap proses utama) atau tidak, perbaikan pada ruang lingkup, perbaikan pada syarat mutu.

- Kesimpulan

Komite Teknis menyepakati 10 dokumen RSNI2 yang telah dibahas. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat konsensus RSNI3 65-05.



Gambar 13. Rapat Teknis RSNI2 Produk Perikanan



Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

IK 3. Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) Sesuai amanah UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh SKP. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, dinyatakan bahwa SKP merupakan salah satu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yaitu perizinan yang diperlukan.

Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) / Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.



Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)	840	1.180	1.060	10.000	962	1.047	1.259	2.009	114,52	20,09		

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II tahun 2024 capaian indikator Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) adalah 962 produk. Capaian indikator Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) sampai dengan triwulan II adalah sebesar 2.009 UMKM atau menurun sebesar 8,12% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 1.047 produk. Capaian ini setara dengan 114,52% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 840 produk atau setara 23,59% terhadap capaian triwulan II tahun 2023 yakni 1.259 produk, yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 10.000 produk, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 20,09%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) sebesar Rp 2.550.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 503.755.932,- atau sebesar 33,58% dari pagu anggaran.

Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi penerbitan SKP mencapai 962 produk atau 50,10% dari target penerbitan SKP di Triwulan II tahun 2024 sebesar 1.920 produk. Beberapa kendala dalam penerbitan SKP di Triwulan II adalah sebagai berikut :



- a) Permohonan penerbitan SKP pada triwulan II hanya sebanyak 1.080 (kumulatif 2.364)
- b) Rekomendasi yang dikeluarkan pembina mutu daerah sebanyak 926
- c) 168 rekomendasi belum dapat diterbitkan SKP nya karena terdapat ketidaksesuaian persyaratan penerbitan SKP.
- d) Beberapa dinas provinsi memiliki anggaran terbatas untuk verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi. Dukungan anggaran TP untuk dinas provinsi sebagai penerbit rekomendasi, efektif dapat digunakan pada bulan Juli 2024.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) adalah pelaksanaan sosialisasi pembinaan terhadap UPI.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) :

1. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada tanggal 3-4 April 2024 di Hotel Santika Mega City Bekasi.
- Peserta:
Rapat dihadiri oleh Sesditjen PDSPKP, Sekretaris BP2MHKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Provinsi DKI Jakarta, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Cirebon, Drh. Novia Priyana Tenaga Ahli Mutu, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama serta peserta zoom dari Pembina Mutu Daerah dari Dinas KP dan Laboratorium Pengujian Produk Perikanan seluruh Indonesia.
- Tujuan Kegiatan:



Tujuan dengan diadakannya rapat koordinasi adalah untuk mensosialisasikan perubahan SOTK di Kementerian Kelautan Perikanan yang terkait dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutu kepada Pembina Mutu PDS.

- Pembahasan:

Pembina mutu harus bersiap mengupgrade diri dalam rangka pembinaan mutu baik di pusat maupun daerah. Cakupan pembinaan tidak hanya sebatas SKP dan HACCP, tapi dapat melakukan pembinaan terhadap pengembangan produk, Standard/ISO,SPDI dan pedoman teknis lainnya seperti : standar bahan baku, standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran, standar produk, standar prasarana, sarana, dan fasilitas; standar metode pengujian; dan standar kemasan dan label. Melibatkan dan memperkuat fungsi laboratorium pengujian dalam rangka pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

- Kesimpulan:

Beberapa kesimpulan dari kegiatan tersebut:

- a. Menyiapkan Roadmap Pembinaan Mutu, SOP Pembinaan, juknis dan pedoman terkait butir-bitir pembinaan.
- b. Melakukan sosialisasi, bimtek, ToT kepada Pembina mutu pusat dan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat kompetensi Pembina mutu dimaksud.



Gambar 14. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



2. Rapat Pembentukan Sistem Pembinaan Berbasis ISO 9001

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada Kamis 18 april 2024 diruang Rapat SKP Dit. PBM, Lt. 13, Gedung Mina Bahari III.
- Peserta:
Drh. Novia Priyana selaku tenaga ahli mutu, Tim Kerja Hukum PDSPKP, Tim Kerja Pengembanagan dan Penerapan Standar, Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil, Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah Besar, Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah, Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, dan Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan.
- Tujuan Kegiatan:
Rapat bertujuan membuat usulan tim Sekretariat Pembinaan Dit. PBM dan menyusun GAP kebutuhan dokumen pembinaan untuk Pembina Mutu Pusat dan Pembina Mutu di Daerah
- Pembahasan:
Struktur organisasi Sistem Pembinaan Mutu diusulkan terdiri dari Manager Puncak (Direktur Jenderal) membawahi Manager Representatif (Direktur Pengolahan) dan dibantu oleh Manager Mutu (QA dan Dokumen Kontrol), Manager Teknis (Pembina Mutu Terdaftar dan Laboratorium), dan Manager Umum (Sekretariat dan Sistem Informasi). Adapun dokumen yang diusulkan untuk kegiatan pembinaan terdiri dari 13 modul masing-masing untuk Pembina Mutu dan UPI, database yang terdiri dari daftar UPI, Pembina Mutu Terdaftar, daftar laboratorium dan data produk perikanan berbasis risiko, serta 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembinaan
- Kesimpulan:
Beberapa kesimpulan dari kegiatan tersebut:
 - a. Pembuatan kebutuhan dokumen atau modul Penetapan Program Pembinaan;
 - b. Penyampaian format atau outline pembuatan materi;
 - c. Penyusunan standart kompetensi pembina mutu;



- d. Pembuatan struktur organisasi system pembinaan mutu yang terdiri dari Manager Puncak (Direktur Jendral) membawahi Manager Representatif (Direktur Pengolahan) dan dibantu oleh Manager Mutu (QA dan Dokumen Kontrol), Manager Teknis (Pembina Mutu Terdaftar dan Laboratorium), dan Manager Umum (sekretariat dan Sistem Informasi).



Gambar 15. Rapat Pembentukan Sistem Pembinaan Berbasis ISO 9001

3. Koordinasi Pembina Mutu Terdaftar

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 bertempat di ruang Rapat Discuss, Raiser Ikan Hias Cibinong.
- Peserta:
Rapat dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja lingkup Dit. PBM, dan 39 Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring.
- Tujuan Kegiatan:
Dalam rangka penetapan pembina mutu terdaftar.
- Pembahasan:
Beberapa pembahasan yang dibahas dalam kegiatan tersebut:
 - a. Data Pembina Mutu tahun 2023 sebanyak 1078 Pembina Mutu yang terdaftar (78 PM Pusat, 367 PM Provinsi, 633 PM Kab./Kota), sedangkan data usulan Pembina Mutu Terdaftar Tahun 2024 sebanyak 764 orang (95 PM Pusat, 312 PM Provinsi, 357 PM Kab./Kota);
 - b. Pembina Mutu Terdaftar telah memiliki sertifikat pelatihan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices), Prosedur



Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operation Procedure), dan/atau HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);

- c. Pembina Mutu Terdaftar mempunyai tugas melakukan pembinaan mutu dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 5. Dalam melaksanakan tugas Mutu Terdaftar harus menyampaikan laporan tertulis (Laporan Hasil Pembinaan) kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

- Kesimpulan:

Rapat bertujuan untuk konfirmasi data Pembina Mutu yang diusulkan oleh tiap DKP Provinsi untuk direkap dan ditetapkan sebagai Pembina Mutu Terdaftar pada Surat Keputusan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Seluruh Pembina Mutu terdaftar tersebut nantinya akan diberi peningkatan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practicess), Prosedur Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operation Procedure), dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).



Gambar 16. Koordinasi Pembina Mutu Terdaftar

4. Rapat Pembahasan Draft Materi Pembinaan Mutu

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 di R.R. Investasi GMB III Lt.15

- Peserta

Perwakilan Timja lingkup Dit. PBM, PM BPPMHKP, SSK BPPMHKP.

- Tujuan Kegiatan



Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah finalisasi materi pembinaan, terutama materi pembinaan HACCP.

- **Pembahasan**

Beberapa pembahasan yang dibahas dalam kegiatan tersebut:

- a. Badan Mutu sedang menyiapkan seluruh regulasi termasuk revisi Permen. Karena SKP menjadi dasar penerbitan HACCP, maka regulasi SKP dan HACCP akan dijadikan satu.
- b. Semua harus mengacu pada regulasi, sementara regulasi belum selesai ditetapkan. Draft regulasi mengacu kepada Codex Food Hygiene. Materi pembinaan diharapkan juga mengacu kepada standar tersebut.
- c. Tujuan pasar ekspor dan dalam negeri perlu dibedakan. Hasil diskusi di Badan Mutu, untuk UKM tujuan dalam negeri tetap mengacu kepada SKP, tetapi jika UKM menuju ekspor maka perlu menerapkan HACCP;
- d. Perlu dipertimbangkan perbedaan persyaratan kelayakan pengolahan antara UPI dan UPRL;
- e. BSN sudah menggunakan SNI nonpangan menggunakan GMP yang konsepnya sama namun berbeda dalam identifikasi bahaya berbeda.

- **Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan dalam kegiatan tersebut:

- a. Menindaklanjuti beberapa catatan masukan pada panduan penerapan GMP;
- b. Membandingkan substansi materi panduan penerapan GMP dengan SNI CXC-1:1969 yang relevan dengan unit pengolahan ikan;
- c. Menambahkan materi penyusunan manual HACCP pada panduan penyusunan manual HACCP.

Tindak lanjut yang dilakukan dari triwulan sebelumnya, yaitu:

- a. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Merancang pengembangan system pembinaan UPI;
- c. Koordinasi pembina mutu terdaftar;
- d. Penyusunan materi pembinaan.



Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

IK 4. Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan merupakan jumlah data informasi industri pengolahan hasil perikanan yang berupa data losses dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu periode waktu.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa indikator kegiatan tersebut bersifat tahunan sehingga pada Triwulan II 2024 belum ada capaian dan akan terlihat di Triwulan IV. Sehingga persentase pertumbuhan capaian kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan belum dapat dihitung. Hal tersebut sama dengan kegiatan Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan pada tahun 2023, dimana pada Triwulan II juga belum terdapat capaian.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan sebesar Rp. 510.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 173.024.820,- atau sebesar 33,93 % dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja profilling industri pengolahan hasil perikanan yaitu:

1. Rapat Sinergi Program dan kegiatan Industrialisasi Pindang



- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Rapat Sinergi Program dan kegiatan Industrialisasi Pindang dilaksanakan di ruang rapat karagenan tanggal 8 Mei 2024 dan dilaksanakan secara hybrid.
- Peserta
Pertemuan dilaksanakan secara hybrid, dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dan dihadiri oleh Ibu Artati Widiarti (APHP Utama), Ibu Innes Rahmania (Pembina Mutu Utama), Ketua Forum Pindang Ikan Nasional (FORPINAS), Ketua Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (APIKANDO), perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota (Pandeglang, Bandung, Sukabumi, Brebes, Kendal, Pati, Trenggalek, dan Klungkung), perwakilan unit eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan Timja Lingkup Direktorat PBM.
- Tujuan Kegiatan
Pertemuan bertujuan untuk menghimpun masukan terkait permasalahan yang dihadapi dan mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk pengembangan industri pindang melalui sinergi berbagai pihak dalam rangka meningkatkan daya saing produk pindang (ikan pindang naik kelas).
- Pembahasan
 - a. Berdasarkan Data KUSUKA tahun 2023, jumlah populasi UPI mikro kecil sebanyak **73.695 unit**, dimana UPI Pemandangan sebanyak **7.368 unit** (sekitar **10%** dari total UPI mikro kecil). UPI pemandangan sebagian besar berada di **pulau Jawa** sebanyak **6.216 unit** (72,99%), sisanya tersebar di Bali-NTB-NTT (1.653 unit), Sumatera (342 unit), Sulawesi (256 unit) Kalimantan (32 unit) dan Maluku-Papua (17 unit).
 - b. Pemandangan umumnya merupakan usaha turun temurun (warisan) dan sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga secara nasional terdapat kendala dan **permasalahan yang cenderung sama dan berulang**, khususnya terkait budaya/perilaku pelaku usaha. Berdasarkan evaluasi tahun 2022, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha pemindang dapat dikelompokkan kedalam 3 aspek meliputi aspek produksi, aspek SDM, dan aspek manajemen usaha



- c. Berdasarkan hasil diskusi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan daya saing produk pindang sebagai berikut:
- *Mapping*/pengelompokan permasalahan terkait produk dan produksi, kemitraan bahan baku, perluasan/segmentasi pasar, sarpras, kelembagaan, SDM/edukasi kepada pelaku dan konsumen
 - Standarisasi produk pindang (*checker* bahan baku dan grade produk) berdasarkan segmentasi pasar dan preferensi konsumen
 - Perlu menaikkan dan menguatkan posisi politis pindang di tingkat nasional dengan mengusulkan pindang sebagai salah satu bahan pangan pokok penting (*bapokting*) difasilitasi Direktorat Logistik dan asosiasi
 - Perluasan akses pasar melalui penjajakan program BPNT dan makan siang gratis (berkoordinasi dengan Kemensos, Bapanas, K/L terkait)
 - Edukasi kepada konsumen akan pentingnya produk pindang yang aman bagi kesehatan (tidak menggunakan pembungkus koran, tidak menggunakan bahan berbahaya dan terlarang). Sehingga secara langsung akan memaksa pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan berbahaya dan terlarang tersebut dalam produknya (KKP dan Dinas)
 - Edukasi kepada pelaku usaha khususnya terkait penerapan GMP/SSOP (KKP dan Dinas)
 - *Modelling* sentra pindang (lokasi sentra *existing*) sebagai lokasi percontohan bersinergi dengan pemda, asosiasi, akademisi, K/L terkait (Kemenpar, Bapenas, Bapanas, lembaga keuangan)
 - Komitmen dan dukungan bersama dari Direktorat Teknis lingkup PDSPKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah agar program dapat terlaksana
 - Penguatan kelembagaan asosiasi agar lebih berperan dalam upaya-upaya perbaikan khususnya pada aspek produk dan produksi



- Kesimpulan
 - a. Melakukan pemetaan permasalahan dan rencana solusi ke dalam rencana aksi jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang
 - b. Identifikasi lapang dan penetapan lokus sentra untuk modelling pengembangan industri pindang, dengan lokus potensial yaitu sentra ikan pindang di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karawang
 - c. Terkait peluang produk perikanan untuk diusulkan dalam program BPNT dan makan siang gratis, Direktorat PBM dan asosiasi perlu menyiapkan data pelaku usaha dan kapasitas produksi sebagai data dukung
 - d. Pembuatan WAG sebagai wadah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan rencana tindak lanjut program kegiatan.



Gambar 17. Rapat Sinergi Program dan kegiatan Industrialisasi Pindang

2. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi Penyelematan Susut dan Sisa Pangan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Rapat Penyusunan Naskah Urgensi Penyelematan Susut dan Sisa Pangan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 di Avenzel Hotel Cibubur.

- Peserta

Pertemuan dipimpin oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Asisten Staf Khusus Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktur Pengolahan dan Bina Mutu), Bappenas, BRIN (Prof. Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem), IPB (Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc), Global Alliance for Improves Nutrition (GAIN), Penggiat Lingkungan (Wasteforchange Konsultan Ekosistem).

- Tujuan Kegiatan

Pertemuan bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka pengelolaan susut dan sisa pangan agar dapat dimanfaatkan kembali untuk ketahanan pangan.

- Pembahasan

Rancangan Perpres Kebijakan dan Strategi Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan dilandasi dengan adanya potensi kerugian ekonomi dan lingkungan yang disebabkan terjadinya Susut dan Sisa Pangan dari tingkat produsen hingga konsumen. Berdasarkan kajian yang dilakukan tim Bapanas bahwa kerugian ekonomi karena susut dan sisa pangan nilainya diperkirakan mencapai Rp213-551 triliun rupiah setiap tahunnya atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia.

- a. Naskah Urgensi Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan yang akan disusun diharapkan dapat merujuk pada program **Asta Cita** Presiden terpilih (2024 – 2029) yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan **ekonomi biru**. Rperpres ini diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga dapat menjadi landasan bagi pemerintahan baru untuk pelaksanaan penyelamatan pangan akibat adanya susut dan sisa pangan, dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program makan siang gratis.
- b. Keterkaitan sektor kelautan dan perikanan dengan rancangan Rperpres Kebijakan dan Strategi Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan, diantaranya;

- Ikan sebagai komoditas pangan bersifat *Perishable Foods* berpotensi mengalami susut nilai dari tingkat hulu – hilir (penangkapan/budidaya, pengolahan, distribusi dan pemasaran, dan konsumen), sehingga perlu upaya penanganan dan



pengolahan ikan yang baik melalui edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, agar nilai gizi ikan dapat tetap dipertahankan.

- Peluang produk kelautan dan perikanan sebagai salah satu alternatif asupan protein pada program makan siang gratis selain daging dan telur



Gambar 18. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi Penyelematan Susut dan Sisa Pangan

3. Kunjungan lapangan untuk perhitungan losses bersama dengan Tim penghitungan losses hasil perikanan di Jawa Timur bersama JP2GI

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Pada tanggal 06-08 Juni 2024 di Kota Surabaya, Kab. Probolinggo dan Kab. Pasuruan, Jawa Timur.
- Peserta
Tim JP2Gi bersama tim Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, UKM, Dinas Perikanan Probolinggo, Eduwisata Magot Center Pasuruan (MCP), dan Tavida (Dua Putri), Garda Pangan (Kota Surabaya).
- Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk pelaksanaan susut hasil produk kelautan dan perikanan bersama dengan Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) di Daerah Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan dan Probolinggo).
- Pembahasan:
Selama ini Garda Pangan telah menyelesaikan isu pembuangan makanan khususnya di Kota Surabaya. Untuk memastikan keamanan makanan yang disalurkan, Garda Pangan menjalankan serangkaian SOP untuk memastikan



kelayakan makanan. Pengecekan ini meliputi pengecekan visual, aroma, dan random tasting. Food bank di Daerah Probolinggo belum ada, sehingga sampah sisa pangan masih belum dimanfaatkan secara optimal. UKM Nurseha (Kab. Probolinggo) merupakan salah satu UKM yang memanfaatkan limbah sisa produk hasil perikanan yaitu sisik ikan kakap yang diolah menjadi collagen. Magot Center Pasuruan (MCP) merupakan pembudidaya magot yang awalnya memanfaatkan limbah sisa pangan dari tempat pembuangan sampah. MCP sekarang sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan makanan dan minuman di Kab. Pasuruan untuk memanfaatkan produk-produk yang terbuang menjadi pakan ternak.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, maka diharapkan hasil yang didapatkan berguna untuk merumuskan peta jalan reduksi susut dan sisa pangan untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan yang tertuang dalam sebuah yang akan launching tanggal 05 Juli 2024.



Gambar 19. Kunjungan lapangan untuk perhitungan losses bersama dengan Tim penghitungan losses hasil perikanan di Jawa Timur bersama JP2GI

4. Keikutsertaan workshop satu bidang PDSPKP

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Pelaksanaan kegiatan workshop satu bidang PDSPKP dilaksanakan tanggal 11 - 13 Juni 2024 di Semarang, Jawa Tengah.
- Peserta:
Kegiatan workshop satu bidang PDSPKP dihadiri perwakilan 2 pelaku usaha dari wilayah Jateng, perwakilan dinas KP Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, validator daerah, validator pusat serta enumerator dari Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- Tujuan Kegiatan:



Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk penyeragaman pemahaman dalam melakukan pendataan dan pengolahan data bagi para petugas data lingkup Ditjen PDSPKP.

- **Pembahasan:**

Workshop ini dilakukan bertujuan untuk memberikan bekal tentang tata cara mengumpulkan data menggunakan kuisisioner, menginput data dalam aplikasi serta melakukan verifikasi dan validasi data bagi enumerator dan validator data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha bidang PDSPKP dan memasukkan data dalam aplikasi satu data. Pendataan satu data bidang PDSPKP tahun 2024 yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data: Volume Produk Olahan (VPO) UPI skala Mikro dan Kecil, stok ikan di *Cold Storage* dan pendataan Harga Ikan.

- **Kesimpulan:**

Kegiatan workshop satu bidang PDSPKP diharapkan mampu menyamakan pemahaman dalam melakukan pendataan dan pengolahan data bagi para petugas data lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 20. Keikutsertaan workshop satu bidang PDSPKP



Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

IK 5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)

Jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan beserta paket peralatan pengolahan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah hasil perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi factor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH). UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Konsep pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah adalah bentuk Hilirisasi produk perikanan melalui pengolahan berbasis bioteknologi, menggunakan peralatan, tenaga kerja dan standar yang benar untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Teknologi metode hidrolisis atau dengan ekstraksi digunakan untuk mengambil protein ikan, untuk mengambil protein sebagai kandungan penting pada ikan sebagai bahan pangan fungsional yang juga bernilai tinggi.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2024 capaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan II Tahun 2023 dimana pada Triwulan II tahun 2024 belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Periode pelaporan indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit) sebesar Rp 10.700.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 347.299.260,- atau sebesar 3,25% dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit), yaitu:

1. Sosialisasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
- Peserta:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, wakil Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Ibu Ema Suryani Nurpriyantomo sebagai ketua penggerak PKK Kota Pekalongan.
- Tujuan Kegiatan:
Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan Penerapan Bioteknologi Hidrolisat Protein Ikan Untuk Peningkatan Gizi dan Kecerdasan Anak, dimana hal ini juga mendukung program Pemerintah dalam menurunkan angka Stunting di Indonesia.
- Hasil:
Dalam sosialisasi tersebut sambutan dan materi dari Kepala Dinas Bapak Sugiyo yaitu mengenai keberadaan Unit Pengolah Ikan Bernilai Tambah Hidrolisat Protein Ikan kepada para peserta, dimana Kadis menjelaskan terkait Unit Pengolah Ikan, pengolahan bernilai tambah, dan pengertian dan manfaat Hidrolisat Protein Ikan bagi anak bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa dan mencegah stunting. Pada materi Berikan Protein oleh ibu Khodijah A.



Zahir yang berjudul “Mencegah Kekurangan Nutrisi dan Meningkatkan Kualitas Produk”, disampaikan bahwa 81% orang Indonesia kekurangan protein berat dengan rata-rata 40gr/orang/hari diantaranya 21,6% balita stunting. Rata-rata konsumsi protein secara global adalah 68gr/orang/hari.

- Kesimpulan:

Dari hasil kegiatan ini diharapkan masyarakat tersosialisasi mengenai produk HPI dan mendukung pembangunan UPI HPI di Kota Pekalongan. Peserta juga telah merasakan produk HPI melalui kue soes, dengan hal ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan produk lainnya berbahan baku HPI.



Gambar 21. Sosialisasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

2. Kunjungan Lapang Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak.

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Dilaksanakan pada tanggal 17-19 April di Kab. Demak, Jawa Tengah.

- Peserta:

Kegiatan dihadiri oleh tim Ditjen PDSPKP dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak beserta tim, Pengelola Sentra yaitu Koperasi Asap Indah, Pengelola Bangsal Ikan Higienis, Kepala Desa Wonosari beserta Tim Konsultan Perencana IPAL dari PT. Citra Mandiri Consulindo (CMC) untuk identifikasi dan verifikasi lapangan terkait kondisi IPAL.

- Tujuan Kegiatan:

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan Permasalahan IPAL Sentra Ikan Asap di Kabupaten Demak yang mengemuka



pada saat pelaksanaan Rakernis Terpadu KKP yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2024.

- Hasil:

Menurut pihak Konsultan IPAL PT. CMC, tidak berfungsinya IPAL di samping karena kerusakan peralatan, pemakaian dan umur ekonomis, tidak optimalnya pengelola dalam melakukan perawatan karena keterbatasan SDM dan anggaran, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kebersihan IPAL, juga karena IPAL overload. Berdasarkan perhitungan sementara, air limbah yang dihasilkan dari 76 pengolah ikan dan bangsal ikan higienis bisa mencapai 350 m³ air/hari.

- Kesimpulan

Berdasarkan kondisi tersebut, pihak konsultan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan/pembongkaran dan pembangunan serta instalasi IPAL baru. Untuk rencana kebutuhan dan detail peralatan IPAL, PT. CMC akan segera menyusun dan mempresentasikannya ke Ditjen PDSPKP. Sedangkan pihak pengelola akan melakukan penyedotan kolam penampungan IPAL. Telah berkoordinasi dengan Dinas PU Kab. Demak untuk upaya tersebut.

Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan PT. CMC untuk menyusun rencana perbaikan IPAL di Sentra Pengolahan Ikan Asap Demak; serta
- b. Memproses administrasi penunjukan konsultan perencanaan IPAL



Gambar 22. Kunjungan Lapang Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak



3. Rapat Sosialisasi Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak.

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 di Ruang Rapat Kepala Dinas KP Kab. Demak, Jawa Tengah.
- Peserta:
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas KP Kab Demak, Pemerintah Desa, dan Dinas LH (Lingkungan Hidup), perwakilan paguyuban pengolah, pengelola sentra dan staf dinas KP Kab. Demak.
- Tujuan Kegiatan:
Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk penyamaan persepsi pekerjaan yang akan dilakukan.
- Hasil:
Dinas KP akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pengerukan sungai di samping sentra dan melaksanakan pembinaan teknis kepada pengolah. Menurut dinas Lingkungan Hidup bahwa kapasitas IPAL yg ada menurut mereka memang perlu ditambah, karena jumlah pengolah sudah bertambah dari desain semula. Perluasan IPAL sebaiknya menjadi ranah OPD terkait untuk penanganan jangka panjang. Dinas LH ingin membahas dgn konsultan IPAL yg ditunjuk KKP terkait ini.
- Kesimpulan:
Beberapa kesimpulan yang didapat dari kegiatan tersebut, yaitu:
 - a. Kontraktor sipil (PT BIN) akan melakukan survey sampling galian dan ukuran lapangan dan mulai mengerjakan pipa utama menuju IPAL untuk memisahkan dr saluran air hujan, pembuatan Grease Trap dan Penambahan saluran air hujan.
 - b. Mengatur jadwal kerja kontraktor dan jadwal kapan pengolah diminta libur bergantian untuk penyambungan saluran IPAL.
 - c. Proses pekerjaan sipil pasang pipa dimulai hari Jumat saat pengolah libur semua. (waktu kerja akan dibahas hari ini, karena menyesuaikan kondisi lokasi pekerjaan.



- d. Pembongkaran lantai beton untuk jalur pipa limbah dimulai Sabtu, 22 juni 2024.



Gambar 23. Rapat Sosialisasi Perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sentra Pengolahan Ikan Asap di Kab. Demak

Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

IK 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP.



Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)	9.540	-	-	38.159	10.239	-	-	10.239	107,33	26,83	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) adalah 10.239 Orang. Capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) sampai dengan triwulan II adalah sebesar 10.239 Orang atau meningkat sebesar 120% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0 Orang. Capaian ini setara dengan 107,33% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 9.540. Pada triwulan II tahun 2023 indikator kinerja tersebut belum memiliki capaian, karena indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 di laporkan dengan periode tahunan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 38.159 Orang, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 26,83%.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Tenaga Kerja yang teribat bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan, yaitu:

1. Capaian tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengadaan *chest freezer* sebanyak 312 orang.



2. Capaian tenaga kerja pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terlibat dalam kegiatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang berasal dari 273 UPI yang tersebar di 7 Provinsi.

Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan

IK 7. Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat daya tukar produk olahan terhadap komoditas biaya produksi dan rumah tangga secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Peningkatan Nilai Tukar Pengolahan dilihat dari selisih NTPHP tahun ke- t dengan tahun ke- $(t-1)$.

$NTPHP > 100$, berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTPHP = 100$, berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya. $NTPHP < 100$, berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya.



Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2024 capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan II Tahun 2023 dimana pada Triwulan II tahun 2024 belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Periode pelaporan indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) sebesar Rp 170.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 60.097.800,- atau sebesar 35,35% dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), yaitu:

1. Rapat Review Aplikasi NTPHP

- Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada Jumat, 19 Maret 2024 di Ruang Rapat Botia, Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor.

- Peserta:

Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar dan dihadiri oleh Perwakilan Pusat Data, Informasi, dan Statistik (Pusdatin), Perwakilan Tim Kerja Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa, Setditjen PDSPKP, sdr. Hariono selaku APHP Muda Setditjen PDSPKP, Penanggung Jawab Data Setditjen PDSPKP, Penanggung Jawab Layanan



Publik Setditjen PDSPKP, dan Pelaksana di Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar, Direktorat PBM.

- Tujuan:

Tujuan rapat adalah untuk memastikan kesiapan aplikasi NTPHP sebelum digunakan untuk kegiatan pendataan NTPHP pada 2024.

- Pembahasan:

Mengenai aplikasi NTPHP, hal-hal yang dibahas di dalam rapat antara lain:

- a. Pembahasan fitur-fitur aplikasi NTPHP yang akan digunakan tim pencacah pusat dan daerah dalam membuat penginputan data dari kuesioner, update data listing, dan validasi data;
- b. Terdapat beberapa fitur yang masih belum dapat digunakan kembali akibat peretasan aplikasi NTPHP;
- c. Salah satu kendala yang ditemui pada aplikasi NTPHP adalah proses penginputan data yang sering terjadi error dan hal ini telah disampaikan oleh tim pencacah di daerah;
- d. Aplikasi NTPHP hanya dapat digunakan untuk menginput data dari enumerator. Untuk validasi dan pengolahan data dilakukan di luar aplikasi NTPHP. Data yang telah diolah kemudian diinput kembali ke aplikasi NTPHP;
- e. Kegiatan penghitungan NTPHP pada 2024 dilakukan per semester;
- f. Terkait perbaikan aplikasi dapat mengundang Tim Kerja Keamanan Siber dan *Data Analytic* Pusdatin untuk kegiatan review aplikasi NTPHP selanjutnya.

Mengenai pendataan NTPHP 2024, hal-hal yang dibahas antara lain:

- a. Kasi dan Kabid di Dinas KP daerah tidak perlu melakukan pendataan ke lapangan, tapi perlu memastikan data yang diinput ke aplikasi NTPHP sudah benar;
- b. Jika terdapat perbedaan data yang dikumpulkan melalui fitur kuesioner dan listing di aplikasi, data yang digunakan adalah data dari fitur kuesioner;
- c. Perlu dibuat SK terkait petugas pencacah NTPHP 2024 di daerah.

- Kesimpulan



Sebagai tindak lanjut dari rapat, akan dilakukan pertemuan mengenai pengolahan data dari aplikasi NTPHP bersama operator NTPHP Tahun 2023.



Gambar 24. Rapat Review Aplikasi NTPHP

2. Workshop Penghitungan NTPHP 2024

- Waktu dan Tempat

Workshop dilaksanakan pada 21-23 Mei 2024 di Kota Bekasi, Jawa Barat

- Peserta

Workshop dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP serta dihadiri Dit. PBM, BBRSEKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota Bandung, Karawang, dan Kab. Sukabumi, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan dari 40 Kab/Kota lokasi NTPHP yang hadir melalui telekonferensi.

- Tujuan

Tujuan dilaksanakan workshop adalah meningkatkan kemampuan enumerator dalam melakukan survei Harga produsen (HK) dan Harga Konsumen (HK) NTPHP.

- Pembahasan:

Dalam kegiatan Workshop Penghitungan NTPHP 2024 disampaikan materi-materi sebagai berikut oleh narasumber kepada peserta workshop.

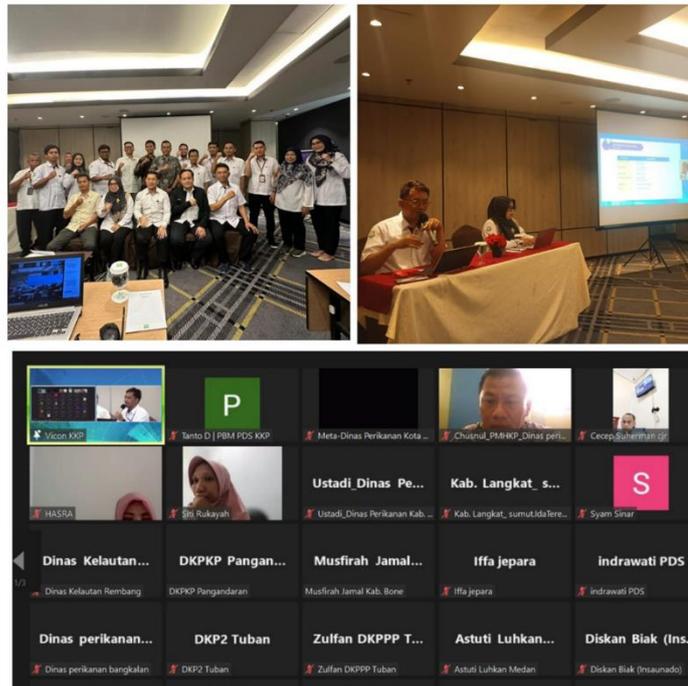
- a. Tata cara pengisian kuesioner NTPHP Harga Produsen
- b. Tata cara pengisian kuesioner NTPHP Harga Konsumen
- c. Strategi penerapan kuesioner serta teknik wawancara kepada responden
- d. Penggunaan aplikasi NTPHP
- e. Tutorial dan simulasi input data harga



- Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan NTPHP dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan Ditjen PDSPKP dengan program kebijakan Ekonomi Biru dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan dan daerah pesisir, serta mandat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelaku usaha perikanan.
- b. NTPHP menjadi ukuran dalam penilaian kesejahteraan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Indonesia serta mengukur ketepatan kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat. Nilai tukar dari 2016 ke 2023 meningkat sebesar 31,8% dan diharapkan nilai NTPHP pada 2024 mencapai angka 104,75.
- c. Kegiatan penghitungan NTPHP 2024 dilakukan di 5 Provinsi pada 40 kab/kota. Pada tahun 2024 diperluas di 2 lokasi program prioritas, yaitu Kalamo P. Pasaran (Kota Bandar Lampung) dan Kalamo Samber-Binyeri (Kab. Biak Numfor).
- d. Data listing NTPHP tahun 2024 masih sama dengan listing yang digunakan pada tahun 2023, tetapi ada kemungkinan perbedaan data listing dengan yang terdapat di lapangan. Jika ada item listing yang berbeda dengan di kuesioner, data tetap dicatat sesuai listing yang terdapat di aplikasi NTPHP.



Gambar 25. Workshop Penghitungan NTPHP 2024

Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

IK 8. Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)

Pabrik Es Portable yang dibangun adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es portable yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 11 Unit Pabrik Es portable yang dibangun dalam mendukung Program Kampung Nelayan Modern. Pabrik Es Portable yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi factor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).



Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pabrik Es Portable yang dibangun (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2024 capaian indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023. Periode pelaporan indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) adalah triwulanan yang dimulai pada triwulan III.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) sebesar Rp 20.200.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 679.463.220,- atau sebesar 3,36% dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pabrik Es Portable Yang Dibangun (unit), yaitu:

1. Kunjungan Lapang ke Kab. Situbondo

- Waktu dan Tempat

Dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Juni 2024

- Peserta

Kabid Perikanan Tangkap, calon operator, kelompok Masyarakat Ababil, dan penyuluh.

- Tujuan

Kegiatan dilakukan dengan bertujuan untuk melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi pabrik es *portable*.



- **Pembahasan:**

Kunjungan ke Kab. Situbondo pada tanggal 4 – 6 Juni 2024. Pada kesempatan tersebut, selain dilakukan kunjungan lapang ke calon lokasi juga dilakukan pertemuan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pertemuan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo terkait rencana Pembangunan pabrik es, yang dihadiri oleh Kabid Perikanan Tangkap, calon operator, kelompok Masyarakat Ababil, dan penyuluh, telah dilakukan koordinasi untuk dokumen perencanaan pembangunan pabrik es portabel tersebut, yaitu: Proposal dan Usulan Pabrik Es Portabel, Usulan calon pengelola (kualifikasi dan kecukupan modal), Data jumlah kelompok nelayan/budidaya dan anggota, Informasi perahu (jumlah, ukuran dan metode penangkapan), Data kebutuhan es untuk kegiatan perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran), Informasi pabrik es yang ada (operasi/tdk operasi), kapasitas produksinya, ukuran es dan harga jualnya, serta data terkait calon lokasi lahan.
- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Lokasi Calon lahan berada di Desa Pesisir Besuki Kab. Situbondo. Luas Kurang lebih 250m. posisi berada di Pinggir jalan. Letaknya dekat dengan PPI Besuki Kab. Situbondo (500 meter). Nelayan tangkap di PPI ini adalah konsumen potensial produk es balok yang rencananya akan diproduksi.
 - b. Sementara ini kebutuhan es dipasok dengan es bungkus ukuran 1-2 kg dengan harga Rp. 800 hingga Rp. 3.000. Dari pemantauan umum, kebutuhan es wilayah ini belum bisa terpasok sepenuhnya. Terdapat lebih dari 200 perahu 5 GT kebawah yang sangat membutuhkan es yang awet. Durasi nelayan daerah Desa Pesisir kategorinya 1 day Fishing.
 - c. Kebiasaan nelayan berangkat siang dan mendaratkan ikan tangkapannya dini hari. Sekali trip biasanya nelayan membutuhkan 10-12 kg es. Sementara pedangan ikan dipasar membutuhkan sekitar



200 kg es per harinya (kecuali hari Jumat libur). Dengan demikian, permintaan es balok untuk produksi pabrik 1 ton per hari akan mudah tercapai. Terkait kesiapan lahan, secara teknis struktur tanah dapat dibangun bangunan ringan dari indokas/beton ringan atau bangunan gudang yang gelah beroperasi lama di lahan tersebut. Luas lahan cukup untuk dibangun PE portabel kapasitas 1 ton per hari (250 m²). Akses jalan cukup bagus berupa jalan beraspal yang dapat memuat kendaraan roda 4. Sementara alat angkut ikan dan balok es, dapat dilakukan menggunakan becak dan/atau kendaraan roda 3. Namun terkait legalitas tanah, belum dibuatkan sertifikat. Namun menurut Dinas, lahan merupakan aset daerah. Dengan diarahkan agar lahan segera diaertifikatkan dan didukung dengan surat pernyataan kepala Dinas Perikanan bahwa lahan terkategori clean and clear.

- d. Sumber air utama di daerah ini menggunakan sumber air baku bor tanah. Kedalaman tanah rata-rata 12 meter dengan kondisi air payau. Diarahkan pengeboran untuk PE portabel lebih dari itu atau sekitar 18-20 meter untuk mendapatkan kualitas air yang lebih baik (lebih tawar).



Gambar 26. Kunjungan Lapangan ke Kab. Situbondo

2. Rapat koordinasi Pabrik Es Portable di Kab. Situbondo

- Waktu dan Tempat



Rapat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, secara hybrid di Ruang Rapat SKP - Ditjen PDSPKP.

- Peserta

Rapat dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo, Auditor Itjen 4 KKP, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM.

- Tujuan

Pembahasan calon lokasi pembangunan pabrik es portable di Kab. Situbondo.

- Pembahasan:

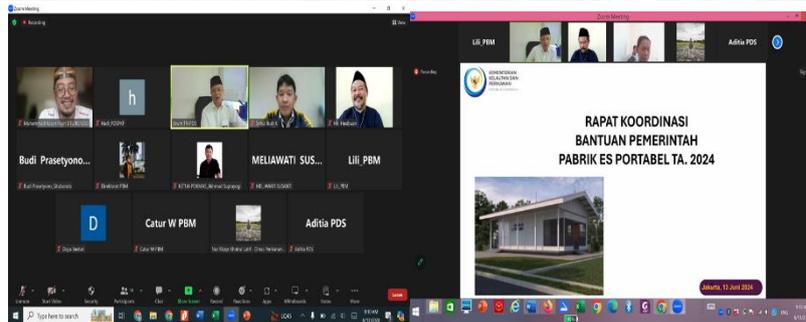
Rapat dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo, Auditor Itjen 4 KKP, serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM. Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada rakor, yaitu :

- a. Lokasi Calon lahan berada di Desa Pesisir Besuki Kab. Situbondo. Luas Kurang lebih 250m. posisi berada di Pinggir jalan. Letaknya dekat dengan PPI Besuki Kab. Situbondo (500 meter). Nelayan tangkap di PPI ini adalah konsumen potensial produk es balok yang rencananya akan diproduksi. Potensial konsumen lainnya adalah para pedagang ikan di pasar Cukok dan para pengumpul ikan.
- b. Sementara ini kebutuhan es dipasok dengan es bungkoa ukuran 1-2 kg dengan harga Rp. 800 hingga Rp. 3.000. Dari pemantauan umum, kebutuhan es wilayah ini belum bisa terpasok sepenuhnya. Terdapat lebih dari 200 perahu 5 GT kebawah yang sangat membutuhkan es yang awet. Durasi nelayan daerah Desa Pesisir kategorinya 1 day Fishing.
- c. Kebiasaannya nelayan berangkat siang dan mendaratkan ikan tangkapannya dini hari. Sekali trip biasanya nelayan membutuhkan 10-12 kg es. Sementara pedangan ikan dipasar membutuhkan sekitar 200 kg es per harinya (kecuali hari Jumat libur). Dengan demikian,



permintaan es balok untuk produksi pabrik 1 ton per hari akan mudah tercapai.

- d. Terkait kesiapan lahan, secara teknis struktur tanah dapat dibangun bangunan ringan dari indikasi bangunan gudang yang telah beroperasi lama di lahan tersebut. Luas lahan cukup untuk dibangun PE portabel kapasitas 1 ton per hari (250 m). Akses jalan cukup bagus berupa jalan beraspal yang dapat memuat kendaraan roda 4. Sementara alat angkut ikan dan balok es, dapat dilakukan menggunakan becak dan/atau kendaraan roda 3.
 - e. Namun terkait legalitas tanah, belum dibuatkan sertifikat, meskipun menurut Dinas, lahan merupakan aset daerah. Disarankan agar lahan segera diaertifikatkan dan didukung dengan surat pernyataan kepala Dinas Perikanan bahwa lahan terkategori clean and clear.
 - f. Sumber air utama di daerah ini menggunakan sumber air baku bor tanah. Kedalaman tanah rata-rata 12 meter dengan kondisi air payau. Disarankan pengeboran untuk PE portabel lebih dari itu atau sekitar 18-20 meter untuk mendapatkan kualitas air yang lebih baik (lebih tawar).
- Kesimpulan
- Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kelompok calon penerima akan segera melengkapi data dukung, diantaranya kesiapan / ketersediaan listrik oleh PLN.
 - b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Situbondo akan segera berkoordinasi dengan Setda untuk mengclearkan status calon lokasi lahan.



Gambar 27. Rapat koordinasi Pabrik Es Portable di Kab. Situbondo

Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

IK 9. *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit)

Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK. Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Pada tahun 2024, target tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan sebanyak 311 unit *chest freezer* yang tersalurkan.



Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Chest Freezer yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
<i>Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)</i>	91	-	-	311	159	-	-	159	120	51,13	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator kinerja *Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)* adalah 159 unit. Capaian indikator *Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)* sampai dengan triwulan II adalah sebesar 159 unit atau meningkat sebesar 159% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0 unit. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 91 unit. Pada triwulan II tahun 2023 indikator kinerja tersebut belum memiliki capaian, karena indikator kinerja tersebut pada tahun 2023 di laporkan dengan periode tahunan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 311 unit, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 51,13%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) sebesar Rp 2.890.100.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.331.051.287,- atau sebesar 46,06% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II ini adalah terlambatnya usulan proposal yang disampaikan oleh mitra. Adapun keberhasilan atau pencapaian adalah koordinasi yang baik dengan Dinas KP Kab/Kota dan kelompok calon penerima. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah melakukan koordinasi intensif dengan mitra.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja *Chest Freezer yang disediakan (unit)*, yaitu:

1. Kunjungan ke PT. Arafah Fitra Karya
 - Waktu dan Tempat



Dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 bertempat di Gudang Penyedia PT. Arafah Fitra Karya, yang beralamat di Jl. Raya Tengah No. 18C, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

- Peserta
Auditor tim Itjen IV KKP, dan tim Dit. PBM.
- Tujuan
Pengecekan kesesuaian spesifikasi barang terhadap surat pesanan.
- Pembahasan
Jumlah Chest Freezer POLYTRON PCF 218 Tahap I Tahun 2024 sebanyak 150 unit dari 311 unit senilai Rp2.200.050.000 dengan spesifikasi pada Surat Pesanan Nomor: 210/DJPDSPKP.0/PL.420/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, yaitu:
 - a. Capaian suhu -207oC dalam waktu 6 jam, Tegangan 220 Volt;
 - b. Ukuran 890 x 600 x 860 mm;
 - c. Dilengkapi Manual Book;
 - d. Dilengkapi Kartu Garansi selama 1 tahun untuk spare part dan 3 tahun untuk kompresor;
 - e. Dilengkapi label bantuan pemerintah tahun 2024.
- Kesimpulan
Spesifikasi barang sudah sesuai dengan surat pesanan.

2. Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) *Chest Freezer*

- Waktu dan Tempat
Dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024, secara hybrid di Ruang Rapat SKP - Ditjen PDSPKP.
Peserta
Kegiatan dihadiri antara lain oleh auditor Itjen 4 KKP, Tenaga Ahli dari Anggota Komisi IV DPR RI (mitra), serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM.
- Tujuan
Tujuan dari kegiatan tersebut untuk koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) *chest freezer* (CF).



- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada rakor, yaitu :

- a. Dengan tren konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.
- b. Namun demikian, masih banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang masih menggunakan sarana pengolahan yang tidak standar. Hal tersebut disebabkan selain ketidaktahuan dari UMK juga karena pada umumnya sarana pengolahan yang standar memiliki harga yang relatif mahal bagi UMK. Permasalahan ini yang menjadi salah satu faktor utama UMK sulit berkembang. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pemerintah berupa Peralatan Pengolahan.

- Kesimpulan

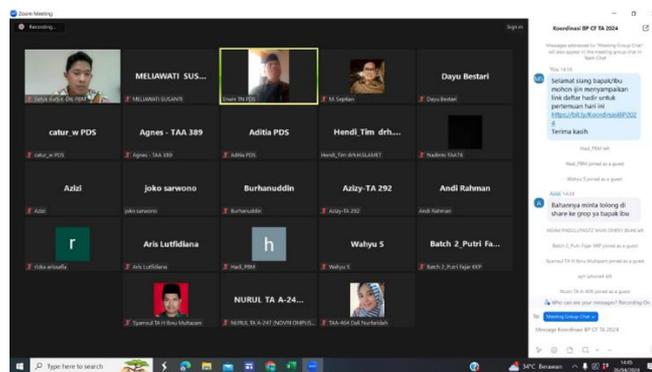
Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencananya calon penerima bantuan pemerintah tersebut adalah para pelaku usaha pengolahan skala mikro kecil yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan maupun instansi terkait, diantaranya adalah usulan dari mitra anggota komisi IV DPR RI.
- b. Terkait hal ini pada tanggal bulan November 2023 telah dilakukan sosialisasi kepada para tenaga ahli dari anggota Komisi IV DPR RI. Salah satu kesepakatannya adalah para TA akan mengusulkan proposal BP CF ke Dit. Pengolahan dan Bina Mutu paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Rencananya sarana sistem rantai dingin (CF) untuk usulan dari mitra adalah sebanyak 220 unit.
- c. Sampai dengan tanggal 25 April 2024, berdasarkan data yang masuk ke Dit. Pengolahan dan Bina Mutu baru sebagian yang mengusulkan proposal dimaksud. Baru ada 14 anggota yang mengusulkan CF,



dengan total usulan sebanyak 45 proposal. Usulan proposal tersebar di 10 propinsi.

- d. Diingatkan kembali kepada para TA bahwa untuk alokasi CF per Kelompok Pengolah maksimal 2 unit. Dit. PBM memberi tambahan waktu pengiriman pengusulan sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.
- e. Untuk nilai CF, disamping dari jenis peralatan, juga tergantung dengan biaya pengiriman.
- f. Di daerah Merauke, karena keterbatasan listrik (daya kurang dari 900 watt), ditempatkan di bale kampung atau rumah yang mempunyai listrik daya listriknya mencukupi. Untuk itu perlu dilengkapi dengan Berita acara penempatan dan kesepakatan bersama.



Gambar 28. Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Chest Freezer

IK 10. Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan value added)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reviu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Indikator Kinerja Peralatan pengolahan ikan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan III, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan III. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan II Tahun 2023 dimana pada Triwulan II juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada capaian Triwulan IV Tahun 2023 tercapai 316 unit, atau setara 100,32%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) sebesar Rp 5.032.500.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 168.747.900,- atau sebesar 3,35% dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit), yaitu:

1. Rapat Koordinasi Penyaluran BP PP Tahun 2024 dengan Mitra

- Waktu dan Tempat

Dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024, secara hybrid di Ruang Rapat SKP - Ditjen PDSPKP.



- **Peserta**
Rapat dihadiri oleh tim auditor Itjen 4 KKP, Tenaga Ahli dari Anggota Komisi IV DPR RI (mitra), serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. PBM.
- **Tujuan**
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Peralatan Pengolahan Ikan.
- **Pembahasan**
Dengan tren konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.
Namun demikian, masih banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang masih menggunakan sarana pengolahan yang tidak standar. Hal tersebut disebabkan selain ketidaktahuan dari UMK juga karena pada umumnya sarana pengolahan yang standar memiliki harga yang relatif mahal bagi UMK. Permasalahan ini yang menjadi salah satu faktor utama UMK sulit berkembang. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pemerintah berupa Peralatan Pengolahan.
- **Kesimpulan**
Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Calon penerima bantuan pemerintah tersebut adalah para pelaku usaha pengolahan skala mikro kecil yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan maupun instansi terkait, diantaranya adalah usulan dari mitra anggota komisi IV DPR RI.
 - b. Terkait hal ini pada tanggal bulan November 2023 telah dilakukan sosialisasi kepada para tenaga ahli dari anggota Komisi IV DPR RI. Salah satu kesepakatannya adalah para TA akan mengusulkan proposal BP CF dan PP ke Dit. Pengolahan dan Bina Mutu paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Rencananya untuk peralatan pengolahan adalah sebanyak 165 paket. Sampai dengan tanggal 25



- April 2024, berdasarkan data yang masuk ke Dit. Pengolahan dan Bina Mutu baru sebagian yang mengusulkan proposal dimaksud. Baru ada 8 anggota yang mengusulkan peralatan pengolahan, dengan total usulan sebanyak 17 proposal. Usulan proposal tersebar di 7 propinsi.
- c. Untuk nilai peralatan pengolahan, disamping dari jenis peralatan, juga tergantung dengan biaya pengiriman. Spesifikasi disesuaikan dengan kelompok, misal untuk kelompok Bakso juga akan mendapatkan peralatan bakso.
 - d. Beberapa jenis peralatan pengolahan yang dirubah antara lain adalah peralatan *Food processor* ke *silent cutter*, dan adanya *Continuous vacuum sealer*. Pihak Tenaga Ahli mengusulkan tambahan untuk *standing freezer* dan alat pembuat sosis. Untuk hal ini, Dit. PBM akan mempertimbangkannya.



Gambar 29. Rapat Koordinasi Penyaluran BP PP Tahun 2024 dengan Mitra

2. Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Peralatan Pengolahan (PP) Tahun 2024, Verifikasi Proposal PP Tahun 2024, Dan Evaluasi Pemanfaatan PP Tahun 2023.
 - Waktu dan Tempat
Dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Mei 2024 bertempat di Hotel Harris Cibinong, Bogor.
 - Peserta



Dihadiri oleh Tenaga Ahli Peralatan Pengolahan, Auditor dari Itbid 4 Itjen KKP, Setditjen PDSPKP, dan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu.

- Tujuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan (PP) Tahun 2024, Verifikasi Proposal PP Tahun 2024, Dan Evaluasi Pemanfaatan PP Tahun 2023.

- Pembahasan

Penyusunan Juknis BP PP, sebelumnya pada tanggal 2 April 2024 telah dilakukan rapat tim kecil untuk membahas Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Peralatan Pengolahan. Berdasarkan hasil rapat tersebut untuk revisi Juknis BP PP dan pencermatan kembali, dalam Juknis BP PP diusulkan jenis peralatan pengolahan yang diberikan yang terdiri dari : 1). Peralatan Pengolahan Produk Bernilai Tambah (Bakso, nugget, sosis, kaki naga dll); 2). Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan (termasuk Keripik Ikan); 3). Peralatan Pengolahan Abon Ikan; 4). Peralatan Pengolahan Ikan Asap; 5). Peralatan Pengolahan Pindang Ikan; 6). Peralatan Pengolahan Lainnya (Ikan Kering, Terasi, Kecap); dan 7). Komponen Peralatan Pengolahan (diilih salah satu). Terkait dengan persyaratan calon penerima BP PP relative sama dengan tahun 2023, diantaranya yaitu bahwa Penerima Bantuan bisa berasal dari Kelompok Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga keagamaan.

- Kesimpulan

Dari hasil kegiatan ini telah disusun draft final Juknis penyaluran BP PP Tahun 2024, verifikasi proposal PP Tahun 2024, serta evaluasi BP PP Tahun 2023.



Gambar 30. Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Peralatan Pengolahan (PP) Tahun 2024, Verifikasi Proposal PP Tahun 2024, Dan Evaluasi Pemanfaatan PP Tahun 2023

IK 11. Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Indikator Kegiatan Sarana Pasca Panen yang Disediakan (unit) merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan portable yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).



Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2024 capaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit) belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan II Tahun 2023 belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit) adalah triwulanan yang baru dimulai pada triwulan III.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) sebesar Rp 7.120.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 206.471.100,- atau sebesar 2,90% dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit), yaitu:

1. Rapat Pembahasan Spesifikasi Peralatan Sarana Pasca Panen

- Waktu dan Tempat

Dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 di

- Peserta

Rapat dihadiri antara lain oleh auditor Itjen 4 KKP, Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, Katimja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah, Katimja Dukungan Manajerial Dit.PBM, serta perwakilan Timja lingkup Dit. PBM.



- Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Pengadaan Sarana Pasca Panen.

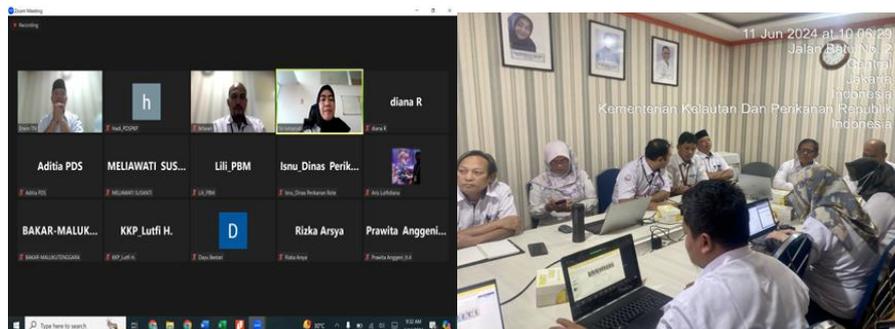
- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Memperhatikan hasil rapat koordinasi BP SPP tanggal 2 Mei 2024 dan desk study terhadap usulan proposal yang masuk, untuk BP SPP Komoditas Rumput Laut calon lokasi yang dipilih adalah di Kab. Maluku Tenggara dan Kab. Rote Ndao. Pertimbangan lainnya pemilihan lokasi tersebut adalah karena di kedua lokasi tersebut merupakan lokasi modelling rumput laut dari Ditjen Perikanan Budidaya
- b. Dinas KP Kab. Maluku Tenggara mengusulkan calon kelompok penerima BP SPP adalah kelompok Metbal Sorbay, dengan justifikasi karena kelompok tersebut sudah siap lahan ukuran 15 x 20 m.
- c. Wakil Ditjen Perikanan Budidaya menyampaikan bahwa untuk lokasi modelling rumput laut di Rote Ndao maupun Maluku Tenggara sudah ada pengelolanya. Karenanya diharapkan jika kegiatan BP SPP ini seperti di modelling rumput laut di Wakatobi, sebaiknya pengelolanya sama.
- d. Dinas KP Kab. Rote Ndao menyampaikan bahwa untuk calon pengelola BP SPP Rumput Laut adalah Yayasan Nusa Tenggara Vokasi. Dimana yayasan ini juga yang ditunjuk menjadi pengelola modelling rumput laut di Rote Ndao
- e. Dinas KP Kab. Rote Ndao menyampaikan bahwa untuk calon pengelola BP SPP Rumput Laut adalah Yayasan Nusa Tenggara Vokasi. Dimana yayasan ini juga yang ditunjuk menjadi pengelola modelling rumput laut di Rote Ndao
- f. Jika BP SPP operasional dan berjalan dengan baik, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu siap memberikan bantuan jenis lain ke wilayah tersebut, seperti bantuan chest freezer dan peralatan pengolahan.



- g. Dalam pemberian jenis peralatan BP SPP Rumput Laut, akan dipertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Karenanya untuk model sistem penjemuran akan digunakan model para – para, bukan sistem gantung. Hal ini berdasarkan informasi bahwa pembudidaya rumput laut di Maluku Tenggara dan Rote Ndao saat ini biasa melakukan penjemuran dengan para – para sederhana.
 - h. Verifikasi terkait data produksi di dua lokasi calon penerima BP SPP RL dilakukan untuk menghindari BP SPP yang tidak operasional.
- Kesimpulan
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maluku Tenggara akan segera memastikan calon operator pengelola BP SPP Rumput Laut sejalan dengan operator pengelola modelling rumput laut dari Ditjen Perikanan Budidaya (Koperasi).
 - b. Dit. Pengolahan dan Bina Mutu akan segera mengirimkan tim ke calon lokasi BP SPP Rumput Laut di Kab. Rote Ndao dan Kab. Maluku Tenggara.
 - c. Mensosialisasikan juknis BP SPP ke stakeholders terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan penyuluh daerah lokasi BP SPP Tahun 2024.



Gambar 31. Rapat Pembahasan Spesifikasi Peralatan Sarana Pasca Panen

2. Koordinasi dan Identifikasi Lapang di Provinsi Aceh

- Waktu dan Tempat



Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17-20 Mei 2024 di Provinsi Aceh.

- Peserta

Dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh, Kepala DKP Pidie Jaya, Kepala DKP Bireun, Kepala DKP Pidie, Kepala DKP Banda Aceh, Kepala Prodi Budidaya dan dosen dari Universitas Syiah Kuala, perwakilan dari Pangkalan PSDKP Lampulo, perwakilan dari BRIN, perwakilan dari Inspektorat IV KKP, serta perwakilan dari Direktorat PBM.

- Tujuan

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pengadaan sarana pengolahan tepung ikan sebagai Upaya penyerapan hasil tangkapan nelayan dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh.

- Pembahasan

- ❖ Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Dinas KP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkomitmen untuk mendukung diadakannya sarana pengolahan tepung ikan sebagai erja penyerapan hasil tangkapan nelayan dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang akan dilakukan oleh Direktorat PBM;

- b. Direktorat PBM berencana untuk memberikan paket bantuan sarana pengolahan tepung ikan *grade* pakan yang dilengkapi dengan alat untuk mengolah minyak ikan. Dalam satu siklus produksi tepung ikan, akan dihasilkan juga minyak ikan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dilakukan untuk menutup biaya operasional ke depannya karena nilai tambah minyak ikan lebih tinggi dibandingkan tepung ikan.

- ❖ Berikut beberapa pembahasan dari hasil kunjungan lapang pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Sarana pengolahan tepung ikan rencananya akan ditempatkan di rumah produksi tepung ikan yang dibangun melalui APB Aceh Tahun 2014 dengan ukuran bangunan 30 x 15 meter dan memiliki ruang proses berukuran 20 x 15 meter;



- b. Rumah produksi tepung ikan saat ini dalam kondisi memerlukan perbaikan dan perapihan bangunan serta perapihan halaman depan dan belakang;
- c. Tersedia sumber air sumur bor namun tidak tersedia instalasi pompa dan tandon air;
- d. Sumber tenaga sebesar 7,5 Kva 3 phase dengan sistem prabayar atau token;
- e. Diperlukan pengecekan IPAL, system apa yang digunakan dan apakah masih bisa digunakan untuk menunjang operasional pengolahan tepung dan minyak ikan ke depannya. Diharapkan nantinya tidak ada masalah lingkungan yang ditimbulkan karena lokasi bangunan rumah produksi tepung ikan berdekatan dengan rumah susun penduduk.
- f. Lokasi rumah produksi tepung ikan berdekatan dengan rumah susun masyarakat dan hanya berjarak sekitar 100 m sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait dampak bau yang ditimbulkan.
- g. Bahan baku terdekat berpotensi didatangkan dari PPS Kutaraja Lampulo dengan jenis ikan lemuru, dencis, layang, cakalang, tongkol dan terakhir ikan rucah (urutan ikan dimulai dari jenis ikan yang paling banyak menghasilkan minyak ikan);
- h. Harga bahan baku ikan mutu rendah yang didaratkan di PPS Kutaraja Lampulo berkisar antara Rp 2.500 – Rp 3.300. Apabila melihat *business usual* penangkapan ikan yang ada di PPS Kutaraja Lampulo, volume ikan dengan kualitas mutu rendah sebagai bahan baku tepung ikan yang didaratkan tidak akan mampu mensuplai kebutuhan bahan baku pabrik tepung ikan yang akan diadakan, sehingga diperlukan pola kerjasama khusus yang dibentuk oleh pengelola pabrik tepung ikan agar bisa mendapatkan suplai bahan baku secara kontinu;
- i. Calon pembeli potensial yang berada di Provinsi Aceh yakni pabrik pakan mandiri yang berada di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee Aceh Besar. Kebutuhan tepung ikan sebagai bahan pembuatan pakan ikan dalam satu tahun berkisar antara 15-18



Ton dengan spesifikasi tepung ikan yang dibutuhkan memiliki kadar protein >50% dan kadar air <10%;

- j. Tepung ikan di pabrik pakan ikan Ujung Bate digunakan sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan pakan ikan nila salin, bandeng dan udang vaname. Dalam pembuatan pakan ikan, pabrik pakan ini menggunakan minyak sayur sebagai salah satu campurannya. Minyak sayur digunakan karena memiliki Tingkat ketengikan yang lebih rendah disbanding minyak ikan;
- k. Pabrik pakan mandiri Ujung Batee selama ini mendatangkan tepung ikan dari Medan dengan kisaran harga beli sebesar Rp 13.000 – Rp 15.000 (harga beli tahun 2023);
- l. Selain pabrik pakan mandiri Ujung Batee, calon konsumen lain yang ada di Provinsi Aceh yakni kelompok usaha pakan ikan mandiri serta peternak dan peternak ayam dan babi yang berada di medan;
- m. Ikan kayu keumamah merupakan olahan khas Aceh yang melalui penyiangian – perebusan – pembelahan – penjemuran – perajangan – penjemuran.
- n. Bahan baku ikan tongkol atau cakalang dengan kisaran harga Rp 5.000 s.d 20.000 tergantung ukuran dan musim.
- o. Ikan kayu dijual dengan harga Rp 250.000/kg dan dipasarkan sebagai oleh-oleh khas Aceh.
- p. Usaha ini dapat dijadikan alternatif solusi rumah produksi disaat tidak mendapatkan bahan baku untuk tepung ikan. Untuk itu perlu didesain lay out rumah produksi yang menjamin potensi terjadinya kontaminasi silang.
- q. Identifikasi calon pengelola rumah produksi dan sarana pengolahan tepung ikan dilakukan pada 3 koperasi, yaitu:
 - Koperasi Panglima Laot
 - Koperasi Produsen Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala
 - Pelaku usaha pakan mandiri di Kabupaten Bireun

- Kesimpulan



- a. Menyusun laporan kajian kelayakan pengadaan sarana pengolahan tepung ikan dengan melibatkan tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala dan BRIN;
- b. Melakukan identifikasi lebih lanjut terkait spesifikasi teknis peralatan pengolahan tepung ikan agar dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi; dan
- c. Mengusulkan kepada DKP Provinsi Aceh untuk melakukan pengecekan status peralatan pengolahan tepung ikan yang saat ini tidak digunakan.



Gambar 32. Koordinasi dan Identifikasi Lapang di Provinsi Aceh

IK 12. Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit)

Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan merupakan jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan portable yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pascapanen sehingga mutu tetap terjaga dan selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan di lokasi Kampung Perikanan Budidaya (MP Korporasi). Adapun paket Sarana Pascapanen yang disediakan antara lain : Sarana Pascapanen Ikan Air Tawar dan Rumput Laut. Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reuiu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, periode pelaporan indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit) diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan III, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan III. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan sebesar Rp1.500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 77.627.100,- atau sebesar 5,18 % dari pagu anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit), yaitu:

1. Rapat Pembahasan Spesifikasi Peralatan Sarana Pasca Panen MP Koorporasi
 - Waktu dan Tempat
Dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 di
 - Peserta



Rapat dihadiri antara lain oleh auditor Itjen 4 KKP, Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, Katimja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah, Katimja Dukungan Manajerial Dit.PBM, serta perwakilan Timja lingkup Dit. PBM.

- Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit).

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. BP SPP 2024 akan meningkatkan kualitas bahan material / peralatan SPP yang digunakan serta menekankan adanya unsur penanganan ataupun pengolahan dalam proses bisnis BP SPP. Sebagai contoh adalah perubahan untuk tempat penanganan/pengolahan dari semula berbentuk tenda terpal menjadi konsep rumah lindung.
- b. BP SPP Koorporasi rencananya akan dialokasikan untuk komoditas ikan air tawar, dan Bandeng yang antara lain diusulkan di Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangkep, Kab. Situbondo, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Lombok Tengah.
- c. Terkait kebutuhan lahan minimum untuk BP SPP MP Koorporasi adalah 6 x 10 m.
- d. Dit. PBM telah menyiapkan rancang bangun Rumah Lindung untuk semua jenis SPP dimaksud. Termasuk di dalamnya peralatan penanganan / pengolahan yang akan diserahkan.
- e. Saat ini Tim dari Itjen 4 KKP sedang melakukan probity audit untuk kegiatan BP SPP Tahun 2024 di lokasi Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Pangkep.
- f. Calon kelompok penerima BP SPP segera menyiapkan kelengkapan persyaratan termasuk di dalamnya surat – surat pernyataan kesiapan seperti kesiapan lahan, listrik, dan sumber air bersih.



- g. Secara umum persyaratan calon penerima BP SPP berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait BP, yaitu Permen KP No. 19 Tahun 2023 . Tetapi untuk calon penerima BP SPP Korporasi dalam bentuk koperasi
 - h. Perlu dicermati rencana pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan di lokasi BP SPP, meskipun limbah yang dihasilkan relative tidak berbahaya, hanya air cucian sementara limbah padatnya (seperti sisa potongan ikan, kepala ikan, isi perut dan insang) langsung dikumpulkan untuk dijadikan pakan ternak.
 - i. Tanggung jawab penyediaan listrik dan IPAL oleh kelompok bisa menjadi sarana edukasi dan tanggung jawab dari kelompok terhadap bantuan BP SPP.
 - j. Ke depannya diharapkan ‘entitas” penerima BP dapat juga dapat menerima Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), untuk itu perlu dicermati lagi design dari Rumah Pelindung untuk penanganan dan pengolahan BP SPP sehingga sudah sesuai dengan prinsip SKP.
- Kesimpulan
Melakukan penyempurnaan Juknis BP SPP sesuai dengan spesifikasi peralatan BP SPP terbaru, serta mengadakan pertemuan dengan Dinas KP daerah lokasi calon penerima BP SPP.



Gambar 33. Rapat Pembahasan Spesifikasi Peralatan Sarana Pasca Panen MP Koorporasi



2. Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2024.

- Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024, bertempat di ruang rapat SKP Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu secara online.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh Kepala / perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2024, auditor dari Itbid 4 Itjen KKP, Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, PJ Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, serta pelaksana dari Timja PSPP - Dit. PBM.

- Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit).

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. BP SPP rencananya akan dialokasikan untuk komoditas ikan air tawar, dan Bandeng yang antara lain diusulkan di Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangkep, Kab. Situbondo, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Lombok Tengah.
- b. BP SPP 2024 akan meningkatkan kualitas bahan material / peralatan SPP yang digunakan serta menekankan adanya unsur penanganan ataupun pengolahan dalam proses bisnis BP SPP. Sebagai contoh adalah perubahan untuk tempat penanganan/pengolahan dari semula berbentuk tenda terpal menjadi konsep rumah lindung.
- c. Calon kelompok penerima BP SPP segera menyiapkan kelengkapan persyaratan termasuk di dalamnya surat – surat pernyataan kesiapan seperti kesiapan lahan, listrik, dan sumber air bersih.



- d. Secara umum persyaratan calon penerima BP SPP berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait BP, yaitu Permen KP No. 19 Tahun 2023. Tetapi untuk calon penerima BP SPP Korporasi dalam bentuk koperasi
 - e. Terkait dengan persyaratan calon penerima BP PP relative sama dengan tahun 2023, diantaranya yaitu bahwa Penerima Bantuan bisa berasal dari Kelompok Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga keagamaan.
 - f. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka persyaratan penerima bantuan ditambahkan syarat bahwa salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- Kesimpulan
- Berikut beberapa kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan segera mengirimkan proposal usulan BP SPP Tahun 2024.
 - b. Dit. PBM akan segera melakukan verifikasi lapang ke calon lokasi penerima BP SPP dan segera menyiapkan proses pengadaan barang dan jasa BP SPP.



Gambar 34. Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2024



3. Rapat koordinasi dengan Dinas KP dan kelompok calon penerima Bantuan Pemerintah (BP) Sarana Peralatan Pengolahan (SPP) MP Koorporasi.

- Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juni 2024 bertempat di ruang rapat SKP Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu secara online.

- Peserta

Rapat dihadiri oleh peserta wakil dari calon penerima bantuan pemerintah Sarana Pasca Panen Koorporasi, yaitu 1) Lombok Tengah (Lele); 2) Gunungkidul (Lele); 3) Situbondo (Lele); 4) Pangkep (Bandeng); 5) Tasikmalaya (Nila); 6) Kota Padang (Lele); 7) Purwakarta (Lele); dan 8) Lampung Timur.

- Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk koordinasi terkait penyaluran Bantuan Pemerintah (BP) Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit).

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Dit. Pengolahan dan Bina Mutu menyampaikan untuk BP SPP MP Koorporasi, calon penerima perlu menyiapkan hal - hal sebagai berikut : menyiapkan lahan(yang sudah dipondasi dengan ukuran 3.6 x 6 meter diatas lahan keseluruhan 6x 10 meter; sumber air bersih, listrik dengan kapasitas 1300 Watt; dan sarana pembuangan air limbah;
- b. Disamping itu para calon penerima bantuan dapat menerima, memanfaatkan, dan merawat dengan baik terhadap bantuan Sarana Pasca Panen Tahun 2024, serta apabila calon penerima tidak dapat memanfaatkan sebagaimana mestinya, maka akan dialihkan kepada kelompok yang lain yang mempunyai niat, dan kesanggupan serta tanggung jawab memanfaatkan bantuan ini sebagaimana seharusnya.
- c. Dari auditor Inspektorat IV KKP memberikan masukan agar dibuat gambar kerja untuk menyamakan persepsi dari para calon penerima



bantuan terkait desain pondasi yang harus disiapkan. Diharapkan dari hal ini dapat dihasilkan keseragaman model konstruksi sesuai dengan juknis yang ada. Pengadministrasian agar tertib, syarat-syarat dan kewajiban harus dapat dipenuhi dari para calon penerima; agar dinas dapat melakukan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan produksi.

- **Kesimpulan**

Tim auditor Inspektorat IV KKP memberikan masukan agar dibuat gambar kerja untuk menyamakan persepsi dari para calon penerima bantuan terkait desain pondasi yang harus disiapkan.



Gambar 35. Rapat koordinasi dengan Dinas KP dan kelompok calon penerima Bantuan Pemerintah (BP) Sarana Peralatan Pengolahan (SPP) MP Korporasi

Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan

IK 13. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait



kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebanyak 1.800 UMKM.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)	820	310	-	1.800	820	310	-	820	100	45,56	-	-

Pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator kinerja kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) adalah 820 UMKM. Capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) sampai dengan triwulan II adalah sebesar 820 UMKM atau meningkat sebesar 37,80% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 310 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 820 UMKM. Pada Triwulan II Tahun 2023 indikator kinerja tersebut belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 1.800 UMKM, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 45,56%.



Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) sebesar Rp1.021.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 684.459.200,- atau sebesar 67,04 % dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM) yaitu terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pembinaan.

Rekomendasi/ tindak lanjut untuk mengatasi kendala adalah dengan melaksanakan pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil secara remote/online.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pada indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

- a. Pemutakhiran database pembinaan;
- b. Kerjasama dan sinergitas dengan UPI skala mikro kecil, Dinas KP dan pembina mutu propinsi/kabupaten/kota

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

1. Pembinaan dalam rangka Modelling Sentra Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klungkung - Bali

- Waktu dan Tempat
Kegiatan dilaksanakan tanggal 29 - 31 Mei 2014 di Kabupaten Klungkung – Bali.
- Peserta
Kegiatan dihadiri oleh pelaku usaha yang dibina adalah 75 pengolah pindang dari 77 pengolah yang ada di Sentra Pemandangan Klungkung - Bali
- Tujuan



Tujuan pembinaan terhadap pengolah pindang di Sentra Pemindangan Klungkung yaitu dalam rangka rencana pelaksanaan Modelling Sentra Kelautan dan Perikanan serta pelaksanaan identifikasi awal.

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Sentra di kelola oleh Badan Usaha Padruen Desa Adat Sari Segara (BUPDA) yang saat ini ditunjuk oleh Dinas Perikanan Kabupaten Klungkung sbg pengelola sentra. Akan dilaksanakan perjanjian kerjasama sbg dasar hukum pengelolaan sentra yg sebelumnya berakhir tahun 2021.
- b. Mekanisme pengelolaan yg diterapkan oleh BUPDA kepada pengolah yaitu retribusi sewa tempat senilai Rp.50.000/bulan/bangsal dan retribusi pengolahan Rp.500/keranjang (1 keranjang dicatat setara 30 kg) dan gas Rp. 750/tabung.
- c. Pengelola sentra sudah terdaftar menjadi BUPDA
- d. Setiap bangsal digunakan oleh pengolah perorangan dan belum memiliki legalitas usaha (hanya 1 pengolah yg memiliki NIB)
- e. Hampir seluruh pengolah menggunakan modal pinjaman dalam melakukan usahanya. Modal pinjaman dimaksud berupa ikan yang menjadi sumber bahan baku pindang.
- f. Bahan baku yang digunakan oleh para pengolah yaitu ikan tongkol, lemuru dan baby tuna (size 5-6 dan size 7-8) dengan rata-rata harga ikan Rp. 15-18 ribu per kg dan harga jual per keranjang rata-rata Rp. 25-30 RB per keranjang
- g. Sumber bahan baku berasal dari nelayan lokal Bali (untuk ikan segar) dan Cold Storage (untuk ikan beku) yang berasal dari Banyuwangi.
- h. Sistem pengolahan yang digunakan oleh pengolah ada yang menggunakan kayu bakar dan beberapa sudah menggunakan gas.
- i. Pada umumnya pengolah belum menerapkan SOP, baik dari segi produksi, penerapqn standar mutu maupun operasional.



j. Tujuan pemasaran ikan pindang dari Sentra Klungkung hanya mencakup wilayah Bali.

- Kesimpulan

Secara umum kondisi sentra pemindangan di Klungkung banyak permasalahan yang harus diatasi dari berbagai aspek sesuai hasil identifikasi. Diperlukan sinergi berbagai pihak agar modelling sentra PHP dapat berwujud sesuai yang diharapkan



Gambar 36. Pembinaan dalam rangka Modelling Sentra Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klungkung - Bali

2. Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM

- Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan secara live youtube Ditjen PDSPKP.

- Peserta

Peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM sebanyak 1.687 orang yang terdiri dari UMKM, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, pemerintah dan penyuluh kelautan dan perikanan

- Tujuan

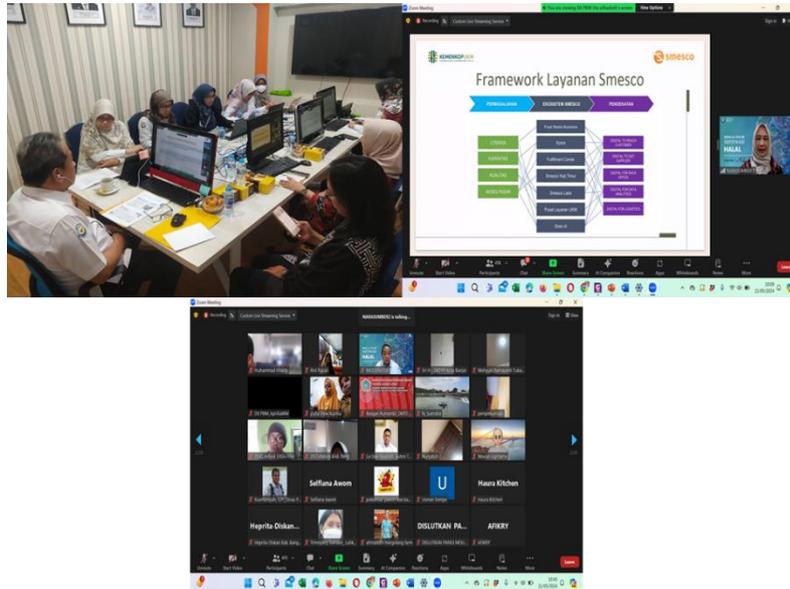


Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM adalah untuk memberikan pemahaman kepada UMKM, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, pemerintah dan penyuluh kelautan dan perikanan dan stakeholder terkait pelaksanaan wajib halal dan mekanisme pengurusan halal serta informasi program-program smesco yang salah satunya adalah halal.

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Narasumber yang menyampaikan materi pada sosialisasi ini yaitu dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu Ibu Siti Aminah sebagai Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal dan Ibu Astika Kasiro sebagai Kepala bagian layanan UMKM LLP, KUKM, Kementerian Koperasi dan UKM.
 - b. Materi yang disampaikan oleh BPJPH yaitu pemberlakuan wajib halal dan berisi tentang regulasi jaminan produk halal, tujuan pemberlakuan wajib halal, wewenang PBJPH, jenis produk yang bersertifikasi halal, kewajiban pelaku usaha, prinsip sertifikasi halal, tarif layanan sertifikasi halal, dan mekanisme sertifikasi halal.
 - c. Materi yang disampaikan oleh Smesco Indonesia yaitu Program Sertifikasi Halal Melalui Smesco berisi tentang tugas LLP KUKM, fungsi layanannya Smesco antara lain Pelaksanaan layanan informasi pasar, Pelaksanaan layanan sarana pemasaran, Pelaksanaan layanan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk KUKM, Pelaksanaan layanan konsultasi pemasaran, Pelaksanaan layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
- Kesimpulan
- Pelaksanaan Menuju Wajib Sertifikasi Halal telah meningkatkan pemahaman UMKM dan stakeholder terkait mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban perijinan halal 2024 sehingga mampu berkontribusi dalam memperkuat sistem halal bagi pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Indonesia tersebut, diperlukan sosialisasi untuk memahami perspektif dan peran halal bagi konsumen dan produsen.



Gambar 37. Sosialisasi Wajib sertifikasi Halal bagi UMKM

3. Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik Tahun 2024

- Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik Tahun 2024 dilaksanakan bulan Mei - Juni Tahun 2024 di Jakarta.

- Peserta

Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik Tahun 2024 diikuti oleh UPI skala kecil di seluruh Indonesia yang diusulkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.

- Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penilaian UPI skala kecil terbaik tingkat nasional adalah:

- a. Mendapatkan UPI skala kecil terbaik dalam penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen produksi yang baik berbasis ekonomi biru;
- b. Memberikan penghargaan kepada UPI skala kecil terbaik dalam rangka penumbuhan motivasi bagi pelaku usaha lainnya.

- Pembahasan

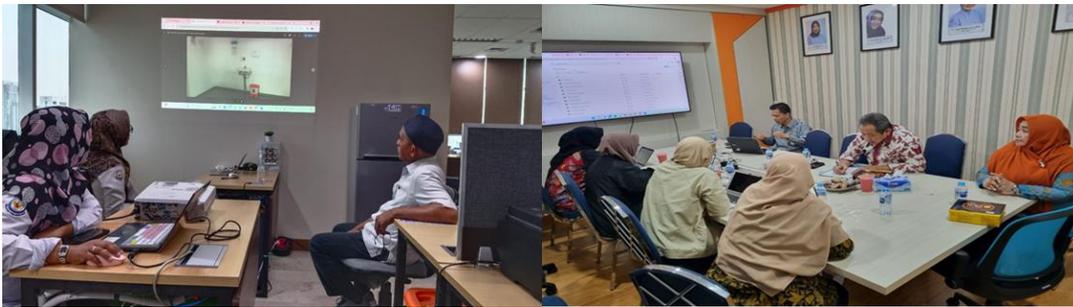


Kegiatan Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik Tahun 2024 dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik.
 - b. Pengiriman Surat Direktur Pengolahan dan Bina Mutu tanggal 27 Mei 2024 nomor B.1790/DJPDSPKP.4/PDS.230/V/2024 tentang Permohonan Usulan Peserta Lomba UPI Skala Kecil Terbaik tahun 2024 ke Dinas Kelautan dan Perikanan Seluruh Indonesia. Berdasarkan surat tsb, sampai dengan tanggal 12 Juni telah diterima usulan dari 22 Propinsi Sebanyak 47 UPI.
 - c. Pelaksanakan verifikasi dokumen oleh tim verifikasi berdasarkan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan di dalam Juklak pada tanggal 13-14 Juni. Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh peserta yang memenuhi persyaratan sebanyak 19 UPI. Namun demikian masih membutuhkan verifikasi ulang dan pertimbangan oleh tim penilai serta konfirmasi terhadap beberapa dokumen kpd UPI sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya.
 - d. Pelaksanaan Pembobotan awal 24 - 26 Juni 2024 oleh Tim verifikasi. Berdasarkan hasil pembobotan tersebut didapatkan hasil nominasi 10 besar dan dilanjutkan dengan rapat pleno hasil pembobotan bersama tim penilai Jumat, 28 Juni 2024. Propinsi yang berhasil masuk 10 besar antara lain Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara
 - e. Minggu I dan II Juli dilaksanakan penilaian verifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan oleh Tim Penilai dan dilanjutkan rapat pleno penetapan pemenang yang selanjutnya disampaikan ke Biro SDMAO melalui Sekretariat Ditjen PDSPKP
- Kesimpulan
Penilaian UPI skala kecil terbaik tingkat nasional merupakan wujud penghargaan pemerintah kepada UPI atas peran serta dan kepedulian terhadap pembangunan perikanan. Melalui pemberian penghargaan tersebut, diharapkan mampu memotivasi UPI pengolahan hasil perikanan lain untuk berkarya dengan cara-cara berproduksi yang lebih baik serta memenuhi



persyaratan mutu dan keamanan produk yang telah ditetapkan agar usaha yang dijalankan mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan.



Gambar 38. Penilaian UPI Skala Kecil Terbaik Tahun 2024

4. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan

- Waktu dan Tempat
 - a. Kegiatan Klinik Mutu pada kegiatan bazar bulanan produk kelautan dan perikanan dilaksanakan pada setiap bulan (April, Mei, Juni) di Gedung Parkir GMB 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Kegiatan Expo Pengawasan Intern 2024 pada Tanggal 21 Mei di Jakarta Timur.
 - c. Kegiatan Hari Keluarga Nasional ke 31 di Kota Semarang pada Tanggal 27-29 Juni 2024.
- Peserta
Peserta yang mengikuti kegiatan klinik mutu terdiri dari seluruh kalangan masyarakat yang mengikuti bazar/expo
- Tujuan
Tujuan adanya klinik mutu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat baik secara online (Instagram) maupun offline.
- Pembahasan
Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu
:



- a. Memberikan layanan informasi terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat baik secara online melalui instagram dan offline melalui bazar/expo.
 - b. Mengikuti bazar bulanan produk kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan dan peningkatan akses produksi pasar produk perikanan.
 - c. Mengikuti bazar Hari Keluarga Nasional ke 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Kesimpulan
Kegiatan klinik mutu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

IK 14. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan Unit Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2024, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebanyak 875 UMKM.



Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)	375	175	-	875	375	175	-	375	100	42,86	114,3	-

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II tahun 2024 capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah 375 UMKM. Capaian indikator Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) sampai dengan triwulan II adalah sebesar 375 UMKM atau meningkat sebesar 46,67% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 175 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 375 UMKM. Pada Triwulan II Tahun 2023 indikator kinerja tersebut belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 875 UMKM, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 42,86%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) sebesar Rp7.348.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 4.343.106.400,- atau sebesar 59,11 % dari pagu anggaran.



Kendala yang dihadapi dalam capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah:

- a. Terdapat beberapa kegiatan bimtek mutu dan nilai tambah yang belum dilaksanakan.
- b. Pelaku usaha/masyarakat perikanan masih banyak yang belum memahami jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

- a. Melaksanakan sosialisasi mutu dan nilai tambah.
- b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing

Faktor keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Teknologi
- c. Lingkungan kerja
- d. Koordinasi dengan instansi terkait

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

1. Rapat Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Nilai Tambah

- Waktu dan Tempat

Rapat Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Nilai Tambah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 di Bogor.

- Peserta

Peserta rapat dihadiri oleh Prof. Dr. Eng. Uju, S.Pi, M.Si. (IPB University), Gatot Yulianto (IPB University), Abdul Rachman (Pembina Mutu Ahli Utama), perwakilan dari BBP3KP, serta masing-masing Katimja dari Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

- Tujuan



Rapat ini bertujuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan nilai tambah sesuai dengan mandatory pada Permen KP No. 59 Tahun 2021 pasal 23 tentang Peningkatan Nilai tambah Perikanan.

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Penggunaan rumus metode hayami sudah sesuai dalam perhitungan nilai tambah.
- b. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan diubah menjadi pengembangan usaha pengolahan ikan karena tidak semua pelaku usaha sudah berbasis industry.
- c. Penambahan ruang lingkup berupa Metode pengambilan contoh dalam pengambilan nilai tambah.
- d. Penambahan contoh perhitungan nilai tambah hasil perikanan pada lampiran penyusunan juklak.
- e. PPNT digunakan untuk menghitung nilai tambah produk, termasuk untuk menghitung ikan hidup.
- f. Penambahan satuan untuk memudahkan perhitungan nilai tambah

- Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Perlunya penyederhaan dalam mengambil data karena untuk menghitung nilai tambah harus membedah setiap biaya produksi.
- b. Perlunya baseline data dari semua varian produk.
- c. Perlunya implementasi perhitungan nilai tambah kepada pelaku usaha.

2. Rapat Koordinasi Data Beririsan Biofarmakologi dan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Pangan (UPHPN)

- Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2024 di Ruang Rapat Pusdatin Lt.16 GMB II KKP.

- Peserta



Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Setditjen DJPRL, Dit. Jasa Pengolahan, Setditjen DJPDSPKP, Dit.PBM, dan tim Pengolahan Data & Statistik, Pusdatin.

- Tujuan
 - a. Membahas produk kelautan dan perikanan yang beririsan pada usulan kuisisioner Kusuka biofarmakologi & kegiatan UPI & UPHPN.
 - b. Kesepakatan Kusuka yang masuk ke subsektor DJPRL atau subsektor pengolahan ikan.

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Berdasarkan Permen KP No.5 th 2024 tentang OTK KKP tugas dan fungsi Dit PBM berada pada pasal 107 dan 108 dengan menggaris bawahi pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah. Sedangkan tugas dan fungsi Dit.Jasa Kelautan berada pada pasal 50 dan 51 dengan menggaris bawahi biofarmakologi kelautan dan bioteknologi kelautan.
- b. Ditjen PRL mengirimkan surat kepada Pusdatin berupa usulan form Kusuka subsektor Pengelolaan Ruang Laut, pelaku usaha biofarmakologi
- c. Adapun produk kp yang menjadi ruang lingkup pada form Kusuka yang diusulkan oleh DJPRL antara lain : hidrolisat protein ikan, minyak ikan, kitin, kitosan, alginat, fukoidan, agar karaginan, krill oil, gelatin, kolagen, astaxantin, fixosianin, fukosantin, fixoeritrin, albumin, suplemen kesehatan, obat dan bahan obat lainnya.
- d. Dit.Jasa Kelautan juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian perihal usulan Biofarmakologi Laut sebagai PB UMKU pada KBLI 210 (Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional)
- e. DJPRL juga telah melakukan beberapa kegiatan terkait biofarmakologi yang antara lain : melaksanakan MoU dengan BPOM tentang Peningkatan Keamanan, Mutu, Manfaat, dan Daya Saing Obat dan



Makanan Bersumber dari Produk KP, pengembangan industri obat dan suplemem kesehatan dan kosmetik bermitra industri, dan pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

- f. Berdasarkan Permen KP No.14 tahun 2021 tentang Standar Produk Hasil Perikanan Nonpangan dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan juga, disebutkan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang untuk produk non pangan berada pada Ditjen PDSPKP.
 - g. Diperkuat juga dengan adanya penyampaikan Keputusan Kepala BSN perihal Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan Non Pangan.
 - h. Opsi yang diberikan oleh Ditjen PDSPKP adalah Kusuka untuk Biofarmakologi supaya tetap berada di Ditjen PDSPKP dan Ditjen PRL berwenang untuk Kusuka produk kelautan dan perikanan. Untuk mencapai keputusan bersama, diharapkan dari masing-masing Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan pembahasan bersama perihal biofarmakologi dan UPHPN.
 - i. Timja Pusdatin belum bisa memutuskan perihal usulan Kusuka yang dibahas dan akan minta arahan kepada pimpinan lebih dahulu
- Kesimpulan
- Berikut beberapa kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :
- a. Untuk mencapai keputusan bersama, diharapkan dari masing-masing Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan pembahasan bersama perihal biofarmakologi dan UPHPN.
 - b. Apabila biofarmakologi dan UPHPN tetap dipertahankan di Ditjen PDSPKP, dimohon supaya masing-masing Eselon II untuk membantu melakukan pendataan produk kp non pangan dan membantu pendaftaran ke kusuka,



Gambar 39. Rapat Koordinasi Data Beririsan Biofarmakologi dan Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Pangan (UPHPN)

3. Partisipasi UMKM Produk Perikanan Bernilai Tambah pada *event Internasional Indonesia Seafood & Meat Expo 2024 (IISM)*

- Waktu dan Tempat

Partisipasi UMKM Produk Perikanan Bernilai Tambah pada event Internasional Indonesia Seafood & Meat Expo 2024 (IISM) diselenggarakan pada tanggal 8 - 11 Mei 2024 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

- Peserta

Peserta UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah UMKM Dimsum Bolekaka, Bilvie, Syabina Berkah, Enza Lele, Gerai De'Pita, Siomay Chipsy, Iwakula, UPI Nilai Tambah Gresik (PT. Gresik Migas Property), (Koperasi Agri Purwa Madani) dan ICS Kampar/ Mina Perkasa.

- Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan peluang dan mendorong pelaku usaha perikanan untuk mempromosikan produknya pada event internasional.

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Adanya transaksi penjualan selama pameran.
- b. Terjalinya kemitraan untuk memperluas pangsa pasar.
- c. Mempromosikan produk perikanan ke masyarakat umum.

- Kesimpulan



Kegiatan pameran ini sangat penting untuk diikuti karena sebagai alternatif untuk mengenalkan produk perikanan dan pelaku usaha dapat memperluas pangsa pasar.



Gambar 40. Partisipasi UMKM Produk Perikanan Bernilai Tambah pada event *Internasional Indonesia Seafood & Meat Expo 2024 (IISM)*

4. Pelatihan Checker Mutu Ikan

- Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan 16 – 18 Mei 2024 di PPN Tual, Maluku.

- Peserta

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perikanan Kota Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, BPPP Ambon Wilayah Kerja Tual, Satuan Kerja BBP3KP Ambon, PT. Samudera Indo Sejahtera, dan CV. Arbil.

- Tujuan

Tujuan pelaksanaan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten untuk membina dan mendampingi pelaku usaha bidang perikanan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan siap ekspor yang ditangkap di wilayah zona penangkapan ikan terukur.

- Pembahasan



Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) kompeten dalam membina dan mendampingi pelaku usaha di Kota Tual, Maluku.
 - b. Peserta diharapkan memberikan laporan monitoring secara triwulan terkait pembinaan kepada pelaku usaha dan penerapan GMP/SSOP sehingga produk perikanan yang dihasilkan bermutu dan dapat berdaya saing.
- Kesimpulan
Pelatihan ini menunjukkan soliditas KKP dalam kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) sehingga pelaku usaha di Tual atau area uji coba PIT bisa menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing.



Gambar 41. Pelatihan Checker Mutu Ikan

5. Hari Keluarga Nasional

- Waktu dan Tempat

Kegiatan Harganas dilaksanakan tanggal 27 - 29 Juni 2024 di Lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah.

- Peserta

Peserta kegiatan Ngaso (Ngobrol Ayik Sore-Sore) Bareng Millenial berasal dari mahasiswa/i Universitas Diponegoro sedangkan peserta untuk



Sosialisasi Ragam Produk Perikanan berasal dari ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di sekitar Kota Semarang.

- Tujuan
Mengenalkan ragam produk perikanan dan pentingnya makan ikan untuk generasi millennial.
- Pembahasan
Memberikan layanan informasi dan edukasi terkait ragam produk perikanan, terutama HPI dan pentingnya makan ikan
- Kesimpulan
Kontribusi KKP dalam kegiatan Harganas ke-31 berhasil menarik pengunjung untuk datang ke booth. Selain mendapatkan informasi terkait produk olahan ikan, pengunjung juga mencicipi produk olahan ikan yang disediakan. Sehingga kegiatan seperti ini diperlukan untuk dapat mempromosikan dan mengenalkan ragam produk olahan ikan ke masyarakat.



Gambar 42. Hari Keluarga Nasional

5. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk

- Waktu dan Tempat
Pembinaan dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk dilaksanakan selama bulan April – Juni 2024 di lokasi dilaksanakannya Bimbingan Teknis Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah.



- Peserta
Peserta yang dibina adalah pelaku usaha produk hasil kelautan dan perikanan
- Tujuan
Tujuan kegiatan adalah untuk membina pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing.
- Pembahasan
Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :
 - a. Pelaku usaha mendapat pengetahuan umum terkait ragam produk perikanan
 - b. Pelaku usaha dapat mengoptimalkan pemanfaatan ikan dan seluruh bagian ikan tanpa ada yang terbuang menjadi limbah (*zero waste*).
- Kesimpulan
Pembinaan dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk sangat berguna agar pelaku usaha memiliki motivasi dan dapat mengolah produk-produk perikanan bermutu dan bernilai tambah.



Gambar 43. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk

6. Bimbingan Teknis Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah

- Waktu dan Tempat
Kegiatan Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di selama tujuh kali selama periode April – Juni 2024, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah, Melawi, Magelang, Kupang, Aceh Tenggara, Kubu Raya dan Jombang.



- Peserta
Peserta kegiatan terdiri dari unsur UMKM perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan, akademisi (mahasiswa/i) dan masyarakat.
- Tujuan
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM/masyarakat terkait pengolahan nilai tambah produk perikanan dan mutu ikan.
 - b. Menumbuhkembangkan usaha perikanan melalui produk bernilai tambah.
 - c. Menumbuhkan wirausaha baru bidang perikanan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha produk perikanan yang sederhana dan dapat dilakukan di skala rumah tangga.
- Pembahasan
Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :
 - a. Mendorong pelaku usaha pengolahan dan seluruh masyarakat perikanan untuk dapat menerapkan mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - b. Mendorong pelaku usaha pengolahan untuk mengembangkan ragam produk.
 - c. Mengajak masyarakat untuk membuat produk perikanan agar bisa meningkatkan ekonomi
- Kesimpulan
Kegiatan ini berguna untuk membina kepada pelaku usaha agar menghasilkan produk perikanan yang bermutu, menumbuhkan wirausaha baru di bidang perikanan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha produk perikanan yang dapat dilakukan di skala rumah tangga.



Gambar 44. Bimbingan Teknis Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah

IK 15. Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) adalah jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu.

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang dapat bersaing di pasar regional maupun global maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kinerjanya.. Pada tahun 2024, target Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina sebanyak 500 industri.



Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)	180	40	370	500	220	40	370	375	120	52	450	-40,541

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II tahun 2024 capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) adalah 220 Industri. Capaian indikator Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) sampai dengan triwulan II adalah sebesar 260 Industri atau meningkat sebesar 81,82% dibandingkan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 40 Industri. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 180 Industri atau setara 40,54% terhadap capaian triwulan II tahun 2023 yakni 370 Industri, yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 875 UMKM, maka capaian triwulan II tahun 2024 telah mencapai 42,86%,

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 397.201.659,- atau sebesar 39,72 % dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian output adalah jumlah output yang cukup besar dalam satu triwulan dan perolehan data kondisi riil UPI yang diusulkan pada kegiatan lomba UPI skala besar terbaik.

Rekomendasi kedepannya untuk memperoleh output yang cukup besar adalah melakukan kegiatan pembinaan melalui webinar, adapun terkait lomba UPI skala besar



terbaik adalah melakukan koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dan melakukan penilaian melalui verifikasi lapang untuk UPI terpilih yang diusulkan Dinas KP Provinsi.

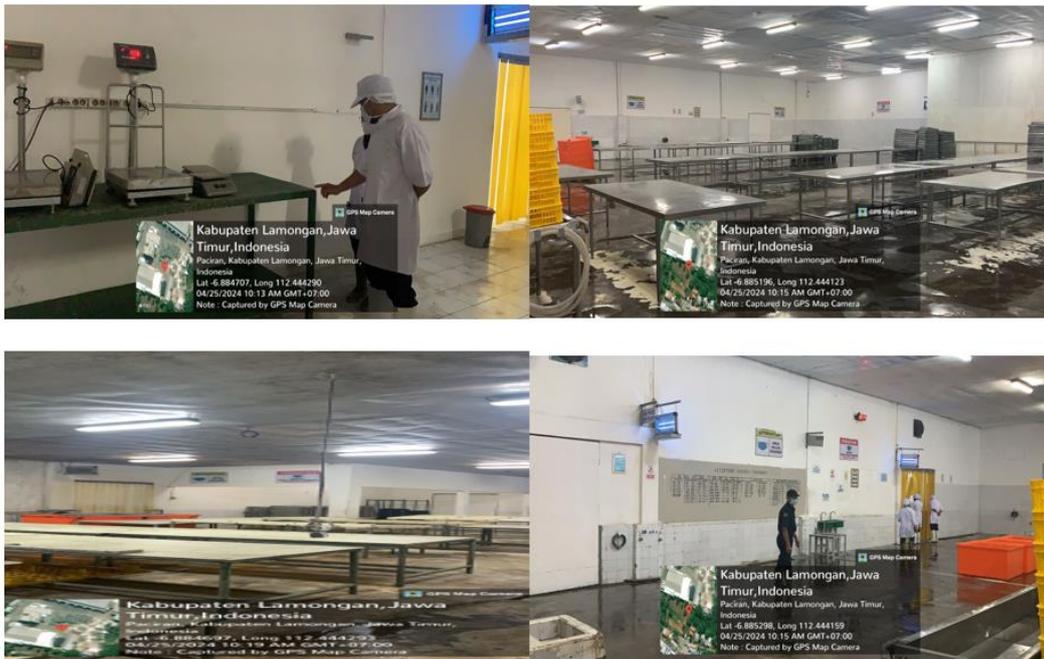
Adapun keberhasilan yang dicapai pada triwulan ini adalah telah tersosialisasikannya kegiatan lomba UPI skala besar terbaik, dan telah dilaksanakannya pembinaan baik melalui FGD ataupun kunjungan langsung ke beberapa UPI.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri), yaitu :

1. Pembinaan UPI di Jawa Timur

- a. PT. Jembatan Lintas Global

Perusahaan ini terletak di Lamongan Jawa Timur, saat dikunjungi tidak ada aktifitas produksi karena tidak ada bahan baku yang disebabkan cuaca yang tidak baik untuk melakukan penangkapan ikan oleh nelayan. Produksi yang dihasilkan adalah produk frozen lizard fish. Setelah dilakukan pengamatan ruang pengolahan, beberapa saran yang disampaikan antara lain agar selalu dijaga kebersihan ruang pengolahan, untuk itu perlu dilakukan pembersihan secara berkala meski sedang tidak memproduksi, jangan ada sampah atau kotoran yang tergenang di saluran air, saluran air agar selalu mengalir, fasilitas pembersih tangan harus selalu tersedia, perlu dilakukan pembersihan dan perbaikan plavon yang sudah terlihat kotor, retak dan berlubang, lantai yang sudah retak dan berlubang agar diperbaiki, gorden plastik menuju ruang pengolahan agar tidak renggang, serta debu dan kotoran yang terlihat di sekitar lampu agar dibersihkan kemudian menggunakan penutup.



Gambar 45. Kunjungan Lapang ke PT. Jembatan Lintas Global

b. PT. Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia

Perusahaan ini terletak di Lamongan. bergerak di bidang perikanan khususnya dalam usaha industri pengolahan dan pengawetan ikan (ikan laut) yang berdiri pada tahun 2004. Produksi dari PT. Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia (PT. HATNI) adalah Frozen Fish (Ikan Beku) dimana dominan jenis ikan Swangi dan Kuniran. Dari Produk tersebut seluruhnya dipasarkan ke luar negeri utamanya China. Adapun bahan bakunya berasal dari TPI Brondong yang merupakan hasil dari tangkapan nelayan Brondong dan sekitarnya.

Saat dilakukan kunjungan, perusahaan ini sedang tidak melakukan produksi, saran yang disampaikan sama dengan perusahaan sebelumnya yakni meski sedang tidak berproduksi kebersihan areal ruang prosesing agar selalu terjaga, untuk itu perlu dilakukan pembersihan secara berkala meski sedang tidak berproduksi, jangan ada sampah atau kotoran yang tergenang di saluran air, saluran air agar selalu mengalir, fasilitas pembersih tangan harus selalu tersedia, perlu dilakukan pembersihan dan perbaikan plavon yang sudah terlihat kotor, retak dan berlubang, lantai yang sudah retak dan berlubang agar diperbaiki, gorden plastik menuju ruang pengolahan agar tidak renggang,



serta debu dan kotoran yang terlihat di sekitar lampu agar dibersihkan kemudian menggunakan penutup.



Gambar 46. Kunjungan Lapang ke PT. Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia

2. FGD Peningkatan Produktivitas UPI Pengalengan Ikan

- Waktu dan Tempat

FGD dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi dan online melalui aplikasi zoom pada 7 Mei 2024

- Peserta

Peserta yang hadir luring dalam FGD ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari perwakilan UPI pengalengan ikan (14 UPI), PSDKP Wilker Banyuwangi,



BPPMHKP Wilker Banyuwangi, BPPP Banyuwangi, Loka BPOM Jember, Dinas Perikanan Banyuwangi, dan UPT PMP2KP Banyuwangi. Sementara peserta yang hadir daring berjumlah 45 orang yang merupakan perwakilan dari UPI (12 UPI yang berlokasi di Pasuruan, Jakarta, Pengambengan, Bitung), APIKI, Kemenperin, UPT PMP2KP Surabaya, Dit. Pengawasan Sumber daya Perikanan Ditjen PSDKP, dan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP.

- Tujuan

Tujuan kegiatan tersebut adalah peningkatan produktivitas sekaligus meng-*update* perkembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI) pengalengan khususnya yang berbahan baku ikan tuna/ cakalang, sarden, lemuru, dan mackerel.

- Pembahasan

Berikut beberapa pembahasan dari hasil diskusi pada kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Produk ikan kaleng masih sangat bergantung pada impor, mulai dari komponen bahan baku (terkadang, apabila pasokan dalam negeri terbatas), kaleng atau bahan dasar pembuat kaleng (tin plate) dan media (saus/ pasta, minyak). Untuk kaleng, pelaku usaha menyampaikan bahwa kaleng buatan dalam negeri kualitas nya masih belum bisa menyamai kaleng impor dan harganya lebih mahal. Sementara untuk impor media ikan kaleng, terkait dengan selera pasar serta kebutuhan dalam proses sehingga minyak yang digunakan adalah minyak bunga matahari atau kedelai yang tidak diproduksi di Indonesia.
- b. Pelaku usaha mengeluhkan adanya sertifikasi produk tumpang tindih antara beberapa instansi seperti KKP dan BPOM dan mengharapkan adanya penyederhanaan dalam proses sertifikasi. Selain itu, akan diupayakan untuk penyederhanaan dalam proses sertifikasi antara lain melalui mutual recognition (keberterimaan) dan joint inspection. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi dan media sehingga pemahaman masyarakat dapat lebih baik dan preferensi untuk mengkonsumsi ikan kaleng dapat meningkat. BPPMKHP akan memfasilitasi pengajuan registrasi EU



approval number, namun UPI juga harus memenuhi persyaratan yang diminta diantaranya memiliki sertifikasi HACCP grade A. - Produk ikan kaleng Indonesia bisa bersaing dengan produk sejenis dari negara lain baik dari segi kualitas maupun biaya produksi.

- c. Mengingat proses pengalengan ikan memiliki resiko yang tinggi, dihimbau kepada UPI untuk mensertifikasi tenaga kerjanya, di mana saat ini telah terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengalengan ikan. Terkait hal ini Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Banyuwangi akan memfasilitasi UPI yang ingin mensertifikasi tenaga kerjanya.
 - d. Beberapa perubahan dalam SNI wajib Ikan Kaleng Tuna Makarel dan Sardin seperti jenis-jenis spesies ikan dan kandungan minimal ikan dalam produk belum tersosialisasikan dengan baik, sementara SNI ini sudah wajib diterapkan untuk seluruh produk ikan kaleng yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun impor mulai tanggal 4 April 2024.
- Kesimpulan
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, perlu koordinasi yang intensif antar instansi terkait seperti KKP, BPOM, Kemenperin, Kemenaker, dan Kemendag serta pelaku usaha dan asosiasi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyeragaman data hulu dan hilir untuk menjamin ketersediaan bahan baku
 - b. Mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti kaleng dan pasta/saus di dalam negeri
 - c. Penyederhanaan sertifikasi
 - d. Pengawasan izin dan SNI wajib produk ikan kaleng yang beredar di Indonesia
 - e. Peningkatan konsumsi ikan kaleng dalam negeri melalui sosialisasi dan edukasi yang menarik
 - f. Pengurangan tarif impor ikan kaleng Indonesia di pasar utama seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.
 - g. Perluasan ke pasar potensial seperti Timur Tengah dan Afrika



h. Sertifikasi bagi tenaga kerja UPI pengalengan ikan

3. Kunjungan lapangan ke beberapa UPI Pengalengan Ikan

a. PT. Banyuwangi Cannery Indonesia (BCI)

UPI ini mulai operasional sejak tahun 2010 dengan produk utama ikan tuna/ cakalang dalam kaleng. UPI memiliki brand sendiri yaitu "Asahi", namun untuk saat ini lebih banyak memproses pesanan dari perusahaan lain (makloon). Bahan baku tuna sebagian besar diperoleh dari Bali dan Papua dengan pembelian melalui supplier. Saat ini tidak ada permasalahan terkait bahan baku baik dari sisi volume, kualitas, maupun harga. BCI sebagian besar (> 95%) diekspor dengan pasar utama Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pasar domestik masih kurang berkembang untuk tuna/ cakalang dalam kaleng karena harga yang cukup tinggi. Bahkan saat ini perusahaan sedang membangun plant baru dengan kapasitas 100 ton bahan baku/ hari lengkap dengan pelabuhannya yang berlokasi di seberang bangunan UPI yang sekarang.

b. PT. Blue Ocean Foods Indonesia (BOFI)

Blambangan Foodpackers yang telah beroperasi sejak tahun 1970`an dan merupakan salah satu perintis UPI pengalengan ikan di Banyuwangi. BOFI mulai mengoperasionalkan bangunan UPI sejak November 2023 namun baru memproduksi frozen tuna cooked loin karena mesin pengalengan PT. BOFI sudah memasarkan produknya baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Bahan baku saat ini diperoleh dari berbagai daerah di Jawa seperti Malang dan Lamongan. Saat ini sedang memperbaiki beberapa bagian dari UPI dan membeli mesin pengalengan ikan serta mengurus perizinan untuk produk ikan kaleng.

c. CV. Pasific Harvest (PH)

CV. PH yang beralamat di Jl. Tratas no. 61 Muncar, Banyuwangi merupakan produsen sarden/ lemuru/ mackerel dalam kaleng dan telah beroperasi sejak tahun 1993. UPI mampu mengolah bahan baku sebesar 60 ton/ hari dengan kapasitas produksi saat ini sudah mendekati 100%. Bahan baku masih dapat dicukupi dari produksi dalam negeri walaupun UPI telah



mendapatkan kuota impor. Sebagai informasi, UPI hanya mengimpor bila kebutuhan bahan bakunya tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sebagian besar produknya diekspor ke pasar Timur Tengah, Afrika, dan Australia. Sementara untuk pasar dalam negeri, UPI menjadi makloon untuk beberapa merk terkenal seperti Gaga dan ABC.

4. Hilirisasi Rumput Laut

Rantai tata niaga rumput laut mulai pembudidaya, peluncur/pengepul, dan pedagang besar/eksportir dari luar daerah. Menurut catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, jumlah pelaku usaha yang bertindak sebagai pengepul/peluncur rumput laut sebanyak 599 orang atau unit usaha. 000 per kg rumput laut kering, di tingkat pengepul/peluncur sekitar Rp8. 000 per kg rumput laut kering dan di tingkat pedagang besar sekitar Rp10. 000 per kg rumput laut kering dengan tingkat kekeringan yang bervariasi. Gudang rumput laut kering yang dimiliki pedagang besar sebagian besar belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Pedagang besar mengeluhkan rendahnya harga rumput laut kering dan tingginya biaya logistik. Pengakuan salah satu pedagang besar, buyer China tidak bersedia jika rumput laut kering diangkut menggunakan kapal kayu tanpa asuransi resmi. Kota Tarakan memiliki pabrik rumput laut ATC yang dibangun Ditjen PDSPKP pada tahun 2016 dan telah diserahkan asetnya kepada Pemkot Tarakan, kemudian aset dihibahkan kepada Perumda Tarakan untuk dikelola. Rencana kedepan, akan difungsikan sebagai Sistem Resi Gudang, kemudian akan dikembangkan fungsinya sebagai pabrik ekstraksi rumput laut atau pengolahan biostimulan. Pengolahan ekstraksi rumput laut skala kecil di Kota Tarakan telah dilakukan oleh PT. Perusahaan ini membutuhkan sekitar 1,6 ton rumput laut basah per hari dengan harga beli sekitar Rp1. Sea Six Energy di Buleleng, kemudian dikirim ke India (PT Sea Six Energy pusat) untuk diproses lebih lanjut menjadi pupuk cair atau biostimulan, karagenan dan biofuel. Cairan rumput laut selanjutnya dilakukan pemurnian, sedangkan cacahannya dijemur/dikeringkan untuk menjadi karagenan kering. Pengolahan rumput laut menjadi pupuk cair atau biostimulan merupakan pengolahan tanpa limbah (zero waste).



5. Pengolahan Ubur-Ubur

Mitra Nelayan Abadi adalah unit pengolahan ubur-ubur yang berdiri sejak tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi angin, perolehan bahan baku akan maksimal jika terjadi angin selatan karena angin selatan membawa arus masuk menuju perairan tarakan dan ubur-ubur termasuk jenis mengikuti arus. 3. Dalam proses pengolahan ubur-ubur ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 hari mulai dari penerimaan, pencucian, pemotongan yang memisahkan antara tentakel dan umbrela, perendaman, pengeringan hingga penirisan. Rendemen olahan ubur-ubur ini cukup rendah yaitu sekitar 10%, yang artinya untuk memproduksi 1 ton produk jadi diperlukan bahan baku sebesar 10 ton. Bahan baku ubur-ubur diperoleh dari nelayan binaan yang melaut kurang lebih 26 hari di laut, sehingga menggunakan kapal penjemput untuk mengambil hasil tangkapan ubur-ubur. Hal ini dilakukan karena nelayan tidak membawa es, sedangkan ubur-ubur bisa bertahan maksimal 6 jam tanpa es. Kapasitas terpasang di ruang produksi sekitar 50 ton bahan baku atau setara 5 ton produk jadi perhari dan perusahaan aktif beroperasi selama 20 hari dalam satu bulan, jika dengan asumsi kapasitas efektif sekitar 80% maka utilitas UPI sekitar 37,5% - 56,25% dalam kondisi optimal. Seluruh produk yang dihasilkan dipasarkan ekspor, dengan komposisi tertinggi yaitu ke negara China dan Taiwan dikirim melalui Surabaya namun sebentar lagi akan dibangun pelabuhan internasional di Tarakan sehingga pengiriman akan dilakukan melalui pelabuhan tersebut.

6. Pengolahan Udang di PT. Mustika Minannusa Aurora

Pada tahun ini, kegiatan ekspor cenderung menurun, hal itu dikarenakan tidak stabilnya ekonomi global akibat konflik dan perang yang menyebabkan permintaan pasar dan daya beli negara tujuan stagnan khususnya pasar Amerika dan Uni Eropa. 2. Sebagai perusahaan pengolahan yang melakukan ekspor ke Eropa, unit pengolahan ini telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, HACCP dan approval number yang berlaku. Namun saat ini masih belum bisa masuk ke dalam pasar Rusia, dikarenakan adanya regulasi khusus terkait bebas radiasi pada produk yang dikirim, dan untuk melakukan uji tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 bulan.

7. Pengolahan Bandeng di PT. Tarakan Fisherindo Sipatuo



Unit pengolahan ini merupakan unit pengolah bandeng terbesar di Tarakan yang memiliki cold storage berkapasitas 400 ton dan ABF kapasitas 4 ton sebanyak 8 unit. Dari total yang diproduksi 90 persen diantaranya dipasarkan ke Jakarta dan sisanya ke wilayah Papua dan ekspor. Seluruh bahan baku bandeng diperoleh dari tambak daerah Tarakan dan sudah memiliki sertifikat CBIB. Luasan tambak yang digunakan mencapai 10 hektare untuk satu tambak, dan untuk pembesarannya tidak menggunakan pakan. Perusahaan menerima bahan baku bandeng semua ukuran, untuk ukuran 500 gram kebawah dipasarkan di Jakarta sedangkan untuk ukuran 500 gram keatas dipasarkan ekspor. Harga bandeng bahan baku untuk size 1 kilogram berisi 4 ekor sekitar Rp 4.000 – Rp 7.000, dan dijual ke Jakarta dengan harga Rp11.000 – Rp12.000 per kilogram.

Kegiatan 16. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

IK 16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.



Pada tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ditargetkan menjadi salah satu unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Target Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) adalah sebesar 75. Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persenthasi TLHP minimal 5,0;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudhnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikarenakan tugas pokok dan fungsi baru di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu yang tengah disusun tidak terdapat lagi pelayanan publik, sehingga tidak adanya anggaran dan kegiatan pendukung Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).



IK 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2024 ditargetkan sebesar 87 sedangkan target semester I adalah sebesar 75. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran, capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada semester I tahun 2024 adalah 86,44. Capaian ini setara dengan 110,82% terhadap target semester I tahun 2024 yakni 78 atau setara 10,26% terhadap capaian semester I tahun 2023 yakni 78,09. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87, maka capaian semester I tahun 2024 telah mencapai 99,36%.



Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	78	-	76	87	86,44	-	78,09	86,44	110,82	99,36	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada semester I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Kendala yang dihadapi pada semester I untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya:

1. Pegawai masih jarang mengikuti diklat ataupun pelatihan yang bernilai 20JP pada semester I;
2. Pegawai yang masih sering tidak melakukan update diklat/pelatihan yang diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya mengingatkan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.



IK 18. Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Pengolahan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebesar 84, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode triwulan II. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,5 poin atau meningkat 4,3% dari target tahun 2023.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.



IK 19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah ditindak lanjuti.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X : Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat PBM (%)

Σa : Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat PBM Tahun 2023

Σb : Jumlah temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat PBM atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 100.



Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan II antara lain:

1. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) tahun 2024 ditargetkan sebesar 80% sedangkan target triwulan II adalah sebesar 80%. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah triwulanan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%) pada triwulan II tahun 2024 adalah 100. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 80 atau setara 6,38% terhadap capaian triwulan II tahun 2023 yakni 94. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 80, maka capaian semester I tahun 2024 telah mencapai 125%.



Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	80	80	75	80	100	100	94	100	120	125	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan II, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 21. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.



Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi) tahun 2024 ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Indikator tersebut perhitungannya adalah tahunan, sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian dan dapat dilihat pada triwulan IV tahun 2024.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

IK 22. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office.

Indikator kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) tahun 2024 ditargetkan sebesar 94 sedangkan target triwulan II adalah sebesar 94. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah triwulanan,



capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) pada triwulan II tahun 2024 adalah 133,33. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target triwulan II tahun 2024 yakni 94 atau setara 33,33% terhadap capaian triwulan II tahun 2023 yakni 100. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 94, maka capaian semester I tahun 2024 telah mencapai 120%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II ini adalah saat penginputan dokumentasi harus dilakukan pemotongan atau cropping sesuai dengan aturan, sehingga dokumentasi menjadi terpotong. Adapun faktor keberhasilan adalah telah terpublikasikannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	92	94	133,33	133,33	100	133,33	120,00	120,00	-	-

IK 23. Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada triwulan IV sehingga pada triwulan II belum terdapat penilaian.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina



Mutu pada triwulan II yaitu rutin melakukan penginputan transaksi keuangan di aplikasi SAKTI.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2024	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II Tahun 2024			TW I 2024	TW II 2023
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2024, capaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada, sama dengan capaian pada triwulan II tahun 2023. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada triwulan IV tahun 2024.

Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 9.313.948.628,- atau sebesar 15,52% dari pagu anggaran setelah terjadi AA. Dimana capaian realisasi ini lebih besar dari realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.668.823.894,- atau 9,86% dari pagu anggaran. Sehingga mengalami kenaikan serapan sebesar 57,40%.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	170.000.000	52.491.900	30,88



No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	1.198.191.000	401.740.750	33,53
3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	2.550.000.000	503.755.932	33,58
4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	510.000.000	173.024.820	33,93
5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	10.700.000.000	347.299.260	3,25
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	—	—	—
7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	170.000.000	60.097.800	35,35
8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	20.200.000.000	679.463.220	3,36
9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	2.890.100.000	1.331.051.287	46,06
10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	5.032.500.000	168.747.900	3,35
11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	7.120.000.000	206.471.100	2,90
12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	1.500.000.000	77.627.100	5,18
13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.021.000.000	684.459.200	67,04



No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	7.348.000.000	4.343.106.400	59,11
15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	1.000.000.000	397.201.659	39,72

IK 24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.



Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi s.d. TW II 2024 Terhadap Target 2024 (%)
	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	s.d. TW II 2024	TW II 2024	TW I 2024	TW II 2023	
Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-



4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja triwulan II tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari April sampai dengan Juni 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 110,94. Adanya peningkatan 8,03 poin atau 7,80% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 1,19 poin atau 1,08%. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan triwulan II diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Perhitungan Utilitas UPI (%); target 68%; capaian 68,12% atau 100%.
- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP); target 840 Produk; capaian 945 Produk atau 112,5% dari target.
- IKK Chest Freezer Yang Disediakan (Unit); target 91 unit; capaian 159 unit atau 120% dari target.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 820 UMKM; capaian 820 UMKM atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 375 UMKM; capaian 375 atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri); target 180 industri; capaian 220 industri atau 118,18%.
- IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (IKU); target 9.540 orang; capaian 10.239 orang atau sebesar 107,33%.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks); target 78; capaian 86,44 atau sebesar 110,82%.



- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%); target 80; capaian 100 atau sebesar 120%.
- IKK Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar; target 94; capaian 133,33% atau 120%.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

4.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan II, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	Belum adanya data sarana prasarana yang diperoleh dari enumerator sebagai dasar perhitungan utilitas	Menetapkan tim analisis data dan melakukan monitoring terhadap data sarana prasarana yang diinput enumerator
Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM)	Terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pembinaan	Melaksanakan pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil secara remote/online



Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM)	a. Terdapat beberapa kegiatan bimtek mutu dan nilai tambah yang belum dilaksanakan. b. Pelaku usaha/masyarakat perikanan masih banyak yang belum c. memahami jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	a. Melaksanakan sosialisasi mutu dan nilai tambah. b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing

4.3.Rekomendasi Tindak Lanjut

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024	Tindak Lanjut
a. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; b. Merancang Pengembangan Sistem Pembinaan UPI; c. Koordinasi Pembina Mutu terdaftar; d. Penyusunan materi pembinaan.	a. Melaksanakan rapat koordinasi pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan b. Melaksanakan rapat pembina mutu terdaftar dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Produk/ <i>Good Manufacturing Products</i> c. Melaksanakan rapat Pembahasan Draft materi pembinaan Mutu d. Melaksanakan Pembentukan Sistem Pembinaan Berbasis ISO 9001



	e. Melaksanakan progress penyusunan modul Pembinaan Mutu
--	--

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (https://drive.google.com/drive/folders/126rRXCCXjRII8x8nUQ6aAKH8Yf_8Uh7D).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terka-hit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih



4.4. Lampiran



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

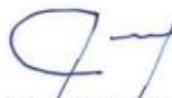
Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan
Bina Mutu



Widya Rusyanto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2.	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/ sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)	10.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4.	Profiling Industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5.	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (Unit)	1
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	38.159
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es portable yang dibangun (Unit)	11
9.	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270
		11.	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
		12.	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
13.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		15. UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		17. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87
		18. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84
		19. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80
		21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		22. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94
		23. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80